DINAS PENDIDIKAN HULU SUNGAI TENGAH

RENSTRA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Rancangan Akhir



2025-2029

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk jangka 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pendidikan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang disepakati bersama.

Renstra ini memuat visi, misi dan tujuan serta sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekaligus program - program dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambunagan.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renstra ini sesuai dengan kaidah - kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Namun kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Barabai, 19 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

H. Muhammad Anhar, S.STP, M.E.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19820916 200012 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 66

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 8

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .. 8

2.1.2 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah 21

2.1.3 Aset Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan ... 24

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah 37

2.1.6 Tantangan Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 42

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah ... 45

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 45

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 48

2.2.3 Isu-Isu Strategis Pada Tingkatan Global, Nasional, Regional dan Daerah 50

2.2.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 50

2.2.5 Isu-Isu Perangkat Daerah 52

2.2.6 Program Prioritas Perangkat Daerah 54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 59

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 59

3.2 Strategi Kerja Jangka Menengah Perangkat Daerah 63

3.3 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah 65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA 67
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 67
4.1.1 Program Prioritas Perangkat Daerah 130
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 135
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 135
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah 139
BAB V PENUTUP 140
5.1 Kaidah Pelaksanaan 140
5.2 Pedoman Transisi 141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah.....	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Gambaran sumber daya manusia aparatur dan fungsional di lingkungan dinas Pendidikan tahun 2025 ...	22
Tabel 2.2	Data pegawai di lingkup dinas Pendidikan Berdasarkan jenjang Pendidikan tahun 2025	22
Tabel 2.1.2.3	Gambaran penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dinas pendidikn tahun 2025	23
Tabel 2.1.2.4	Jumlah Lembaga yang dikelola dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	23
Tabel 2.1.3.1	Data aset tetap dilingkungan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	24
Tabel 2.1.3.2	Data prasarana di lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	24
Tabel 2.1.4.1	Pencapaian kinerja pelayanan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	26
Tabel 2.1.4.2	Anggaran dan Realisasi pendanaan pelayanan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	28
Tabel 2.1.6.1	Kelompok sasaran layanan Berdasarkan tupoksi bidang pada dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	44
Tabel 2.2.1.1	Identifikasi permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	47
Tabel 2.2.3.1	Isu-isu strategis pada berbagai tingkatan (global, nasional, regional dan daerah)	51
Tabel 2.2.5.1	Isu strategis dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	54
Tabel 3.1.1	Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten hulu sungai tengah	56
Tabel 3.1.2	Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator rencana strategis Kabupaten hulu sungai tengah	57
Tabel 3.2.1	Tujuan, sasaran dan Kebijakan	59
Tabel 3.3.1	Perumusan arah Kebijakan renstra perangkat daerah dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah	62
Tabel 4.1.1	Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan dinas Pendidikan Kabupaten hulu sungai tengah periode renstra 2025-2029	64
Tabel 4.1.2	Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat	105

	daerah dinas Pendidikan	
Tabel 4.1.1.1	Program prioritas perangkat daerah	135
Tabel 4.3.1	Indikator kinerja utama perangkat daerah	147
Tabel 4.4.1	Indikator kinerja kunci perangkat daerah	149

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Kecerdasan suatu bangsa merupakan kunci daya saing dan kesejahteraan suatu bangsa.

Fungsi dan tujuan pendidikan dinyatakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan mutu layanan pendidikan yang sesuai dengan standar. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 12 dinyatakan bahwa Pendidikan merupakan salah satu dari enam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 18 dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada pasal 298 ditegaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Dalam rangka mewujudkan undang – undang di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa indikator kondisi pendidikan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pendidikan yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.1.1 Pengertian Renstra Dinas Pendidikan

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Rencana strategis adalah suatu rencana jangka menengah yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi/instansi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu lima tahun dalam berbagai kemungkinan
keadaan lingkungan. Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan – tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program – program strategi yang diperlukan untuk tujuan – tujuan tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai tengah selaku penanggung jawab teknis penyelenggara bidang pendidikan menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai tahapan lanjutan atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran pelaksanan pendidikan di Kabupaten baik jajaran pemerintah maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan bidang pendidikan untuk lima tahun kedepan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

Penyusunan Renstra dilakukan secara transparan berdasarkan visi dan misi kabupaten Hulu Sungai tengah, serta memperhatikan aspirasi berbagai pihak, seperti perwakilan dari Dewan Pendidikan, Dewan kesenian, Komite Sekolah, K3S, MKKS, PGRI, HIMPAUDI, Pengawas dan Penilik Sekolah dalam Forum Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 15 ayat (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergidan harmonisasi dengan BAPPEDA (Bapalitbangda) dan pemangku kepentingan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, meliputi:

a. Analisis gambaran pelayanan;
b. Analisis permasalahan;
c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
d. Analisis isu strategis;Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
e. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

1.1.3 Keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

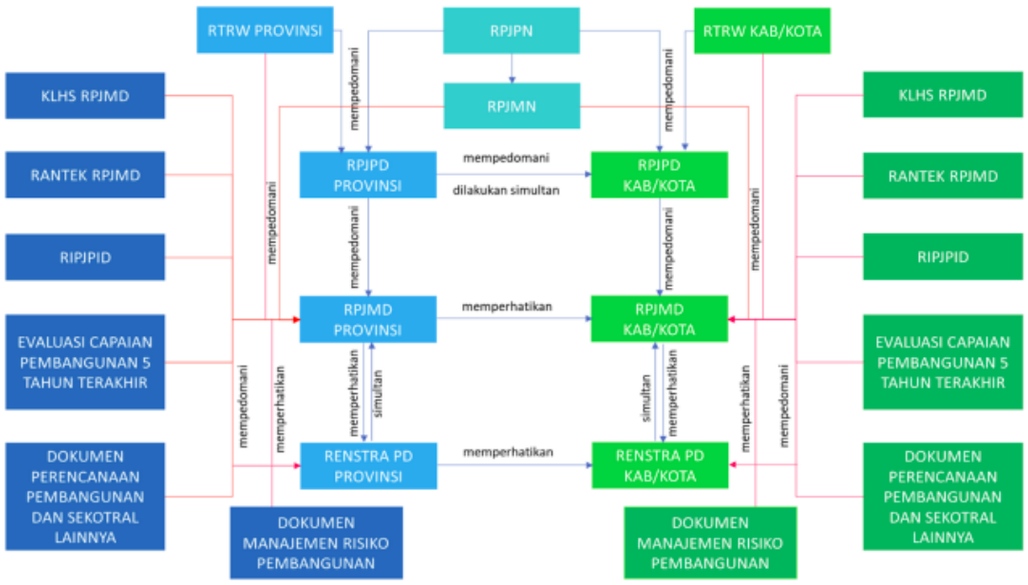
Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan hierarkis. Renstra bukanlah dokumen yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sebuah sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Keterkaitan ini bertujuan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Pendidikan selaras dan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara keseluruhan.
Berikut adalah keterkaitan Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
   Ini adalah keterkaitan yang paling fundamental dan hierarkis.
   - Sebagai Penjabaran RPJMD: Renstra Dinas Pendidikan berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan visi, misi, dan sasaran strategis Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD (5 tahun) ke dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. RPJMD memberikan arah dan prioritas pembangunan secara makro, sementara Renstra menerjemahkannya ke dalam program dan kegiatan konkret di sektor pendidikan.
   - Sebagai Acuan: Setiap tujuan, sasaran, dan indikator

yang ada di dalam Renstra Dinas Pendidikan harus selaras dan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tidak boleh ada program di Renstra yang tidak relevan dengan RPJMD.

2. Keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan
    - Sebagai Turunan Tahunan: Renja Dinas Pendidikan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renja memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam satu tahun anggaran.
    - Sebagai Pedoman Penyusunan: Setiap kegiatan dalam Renja harus mengacu pada program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renstra menjadi master plan yang memandu penyusunan Renja dari tahun ke tahun.
3. Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
    - Sebagai Pondasi Jangka Panjang: RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD memberikan visi pembangunan yang sangat luas.
    - Sebagai Kontribusi: Meskipun secara langsung Renstra adalah turunan RPJMD, setiap Renstra dalam siklus 5 tahunan harus tetap berkontribusi pada pencapaian visi besar yang tertuang dalam RPJPD. Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan akan konsisten dalam jangka panjang.
4. Keterkaitan dengan Dokumen Anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD)
    - Sebagai Dasar Penganggaran: Renstra dan Renja menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD). Setiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dalam Renstra dan Renja.
    - Sebagai Keterpaduan: Adanya Renstra memastikan bahwa alokasi anggaran tidak dilakukan secara sporadis, melainkan didasarkan pada strategi dan prioritas yang jelas untuk mencapai sasaran pendidikan yang telah ditetapkan.
5. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
    - Sebagai Acuan Kinerja: Renstra adalah dokumen utama dalam sistem SAKIP. Indikator kinerja yang ada dalam Renstra menjadi acuan untuk pengukuran capaian kinerja tahunan.
    - Sebagai Dasar Evaluasi: Evaluasi kinerja Dinas Pendidikan (melalui LAKIP/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja riil dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun

2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 142);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud :

1. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya;
2. Memberikan gambaran tentang isu – isu strategis pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang;
3. Penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan Pembangunan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disertai dengan gambaran Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatifnya menyesuaikan dengan Visi Misi Bupati Hulu Sungai Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan

sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode 2025 – 2029;

2. Sebagai pedoman penentuan prioritas/pilihan program kegiatan tahunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN;Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029, mengacu dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika daftar isi Renstra PD yang disajikan. sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.2. Strategi Kerja Jangka Menengah Perangkat Daerah
3.3. Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP
5.1. Kaidah Pelaksanaan
5.2. Pedoman Transisi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dapat dijabarkan bahwa Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan Kedudukan tersebut Dinas Pendidikan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
b. penyelenggaraan kebijakan di bidang pendidikan;
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
d. penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas dan
f. fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

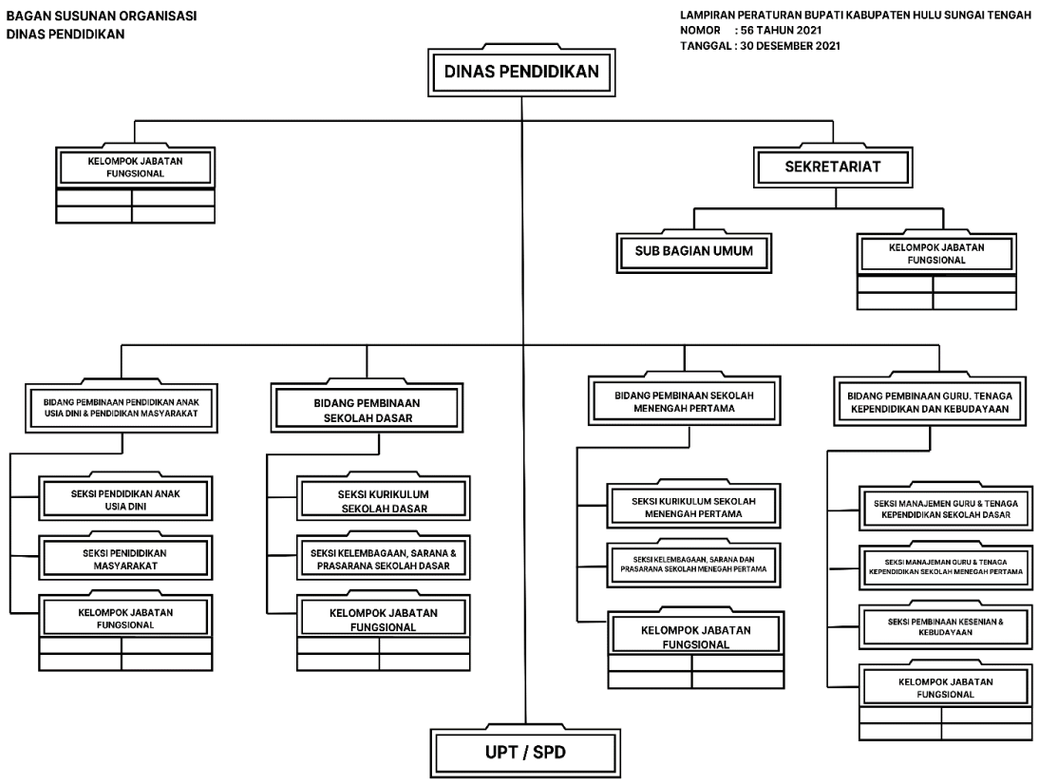
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum; Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
    3. Jabatan Fungsional
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
    1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;
    2. Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Sekolah Dasar.
    3. Jabatan Fungsional
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
    1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
    2. Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
    3. Jabatan Fungsional
f. Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kebudayaan membawahkan:
    1. Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;

2. Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan.

g. Unit Pelaksana Teknis berbentuk Satuan Pendidikan, dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Dinas Pendidikan



Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
c. pengoordinasian penatausahaan urusan keuangan;
d. pengoordinasian penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum perkantoran.

   Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

   a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
   b) pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
   c) pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
   d) penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
   e) pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan protokol;
   f) pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
   g) pelaksanaan penyiapan bahan kerjasama teknis Dinas;
   h) pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
   i) pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
   j) pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   k) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
   l) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian.

   Subbagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

   a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
   b) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   e) pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
   f) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
   g) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
   i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.

   Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

   a) pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
   b) pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
   c) pelaksanaan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   d) pelaksanaan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   e) pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   f) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   g) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
   h) pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
   i) pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
   j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
   k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pembinaan kelembagaan sarana, prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pendidikan

anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pembinaan kelembagaan sarana, prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;

c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pembinaan kelembagaan sarana, prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;
d. pengoordinasian pelayanan perijinan kepada lembaga pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;
e. pengoordinasian penyusunan konsep dan penyempurnaan kurikulum muatan local Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;pengoordinasian penetapan sistem evaluasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
f. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
g. pengoordinasian pengusulan, penetapan, pendirian maupun penutupan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan criteria penilaian serta pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini.
   Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan rencana kerja Seksi;
   b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian serta pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini;
   c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian serta pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini;pengumpulan dan pengolahan data Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   d) penyiapan bahan penetapan, pembinaan dan pemantauan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan anak usia dini;
   e) bimbingan teknis dan evaluasi akhir penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   f) pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   g) pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
   h) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan

anak usia dini (PAUD);

i) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian serta pembinaan ketenagaan pendidikan anak usia dini;
j) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
k) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan criteria penilaian, pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan ketenagaan pendidikan masyarakat dan non formal.Seksi Pendidikan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi;
b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan ketenagaan pendidikan masyarakat dan non formal;
c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian, pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana serta pengembangan ketenagaan pendidikan masyarakat dan non formal;
d) pengumpulan dan pengolahan data pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
e) penyiapan bahan penetapan, pembinaan dan pemantauan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
f) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi akhir penyelenggaraan pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
g) pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
h) pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
i) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
j) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan, pembinaan dan pemantauan kurikulummuatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan masyarakat dan pendidikan informal;
k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
l) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) dan Dikmas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaankelembagaan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas. Seksi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a) penyusunan rencana kerja Seksi;
b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;
c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;
d) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
e) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f) penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan dan peningkatan penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas;
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;
d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengembangan,

analisis serta penerapan kurikulum sekolah dasar;

e. pengoordinasian pelaksanaan operasional pendidikan sekolah dasar;pengoordinasian pemrosesan pemberian ijin pendirian, penutupan serta pencabutan ijin satuan pendidikan ekolah dasar;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar.
   Seksi Kurikulum Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan rencana kerja Seksi;
   b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan criteria penilaian sekolah dasar;
   c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
   d) penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan criteria penilaian sekolah dasar;
   e) penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
   f) penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
   g) penyiapan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
   h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
   i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik sekolah dasar.
   Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan rencana kerja Bidang;
   b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik Sekolah Dasar;
   c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik Sekolah Dasar;
   d) penyusunan pedoman penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Dasar;

e) pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakulikuler Sekolah Dasar;
f) pelaksanaan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang Sekolah Dasar;
g) penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter siswa Sekolah Dasar;
h) Fasilitasi bantuan kepada peserta didik jenjang Sekolah Dasar; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana kerja Seksi;

b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
d) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan Sekolah Dasar;
e) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
f) penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
g) penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Dasar;pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan kurikulum dan penilaian, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan peserta didik serta pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis, pengembangan, analisis serta penerapan kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;pengoordinasian pelaksanaan operasional pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
e. pengoordinasian pemrosesan pemberian ijin pendirian, penutupan serta pencabutan ijin satuan pendidikan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

   Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuda menyelenggarakan fungsi:

   a. penyusunan rencana kerja Seksi;
   b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   d. penyiapan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan criteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   e. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama; penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   f. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
   g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
   h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
   Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
   a) penyusunan rencana kerja Bidang;
   b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
   c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
   d) penyusunan pedoman penerimaan siswa baru jenjang Sekolah Menengah Pertama;
   e) pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kesiswaan dan ekstrakulikuler Sekolah Menengah Pertama;
   f) pelaksanaan administrasi peserta didik pada tingkat Kabupaten pada jenjang Sekolah Menengah Pertama; penyusunan pedoman teknis pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter siswa Sekolah Menengah Pertama;
   g) fasilitasi bantuan kepada peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama;
   h) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
   i) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
   Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja Seksi;
   b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
   c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
   d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
   e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama termasuk pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

g. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Sekolah Menengah Pertama;
h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kebudayaan**

Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta pengembangan kesenian dan kebudayaan.

Bidang Pembinaan Guru, Tenaga Kependidikan, dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

a. pengoodinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
b. pengoodinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta pengembangan kesenian dan kebudayaan;
c. pengoodinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta pengembangan kesenian dan kebudayaan; pengoodinasian pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. pengoodinasian pelaksanaan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

   Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

   a) penyusunan rencana kerja Seksi;
   b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
   c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga

kependidikan Sekolah Dasar;
d) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
e) penyiapan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
f) pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
Seksi Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana kerja Seksi;
b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
d) penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
e) penyiapan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
f) pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan pendidikan kesenian dan kebudayaan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat.
Seksi Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a) penyusunan rencana kerja Seksi;

b) penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
d) penyiapan bahan dan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi;
e) penyiapan bahan dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
f) penyiapan bahan dan pembinaan dan pengembangan kesenian serta fasilitasi sarana dan prasarana kesenian;
g) penyiapan bahan dan pembinaan dan pengembangan sejarah lokal;
h) penyiapan bahan dan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya; pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
j) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. **Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan**

Sebagaimana Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan merupakan unit kerja non structural pada Dinas yang berkedudukan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidkan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan koordinator layanan administrasi bidang kepegawaian;
2) Pelaksanaan koordinator layanan administrasi bidang keuangan;
3) Pelaksanaan koordinator layanan administrasi bidang ketatausahaan lainnya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai organisasi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang Pendidikan, perlu didukung oleh sarana sumber daya agar program – program pendidikan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati terpilih, khususnya di bidang penyelenggaraan bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki sumber daya yang berupa sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri

maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah – sekolah. Sedangkan tenaga fungsional terdiri dari guru, pamong, penilik, dan pengawas yang melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sumber daya manusia aparatur Dinas Pendidikan terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1.2.1
Gambaran Sumber Daya Manusia Aparatur Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2025

Eselon	Laki-Laki	**Perempuan**	**Jumlah**	**Keterangan**
Pegawai Dinas Pendidikan (Jabatan Struktural dan Fungsional Umum)	35	13	48 Orang	ASN
Pengawas PAUD/SD/SMP dan Penilik	10	15	25 Orang	ASN
Tenaga Pendidik PAUD	7	72	79 Orang	ASN
Tenaga Pendidik Kesetaraan	1	3	4 Orang	ASN
Tenaga Pendidik SD	748	1447	2195 Orang	ASN
Tenaga Pendidik SMP	116	231	347 Orang	ASN
Tenaga Kependidikan SD	19	3	22 Orang	ASN
Tenaga Kependidikan SMP	2	7	9 Orang	ASN
Tenaga Kependidikan Kesetaraan	1	1	2 Orang	ASN

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

Selanjutnya Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1.2.2
Data Pegawai di Lingkup Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	**KANTOR DISDIK**		**Pengawas/ Penilik**		**DIKMAS**		**PAUD**		**SD**		**SMP**		**SKB**		**Jumlah**
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD	0	0	0	0	1	0	0	3	1	4	0	0	0	0	9
SMP	0	0	0	0	0	0	1	16	4	1	0	0	0	0	22
SMA	2	4	0	0	21	24	15	264	54	18	4	5	3	3	417
D1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
D2	0	0	0	0	1	0	1	19	32	16	0	1	0	0	70
D3	2	0	0	0	1	1	1	3	0	0	1	1	0	0	10
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S1	25	9	7	10	45	126	18	530	648	1395	124	232	4	20	3193
S2	6	0	3	5	0	1	0	3	9	14	8	13	0	0	62
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**35**	**13**	**10**	**15**	**69**	**152**	**36**	**840**	**748**	**1448**	**137**	**252**	**7**	**23**	**3785**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

Sedangkan gambaran penyebaran Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2025 tersebar di 11 kecamatan yang terdiri dari jenjang PAUD, SD, dan SMP meliputi tenaga PNS dan Non PNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1.2.3
Gambaran Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2025

KECAMATAN	PAUD				SD				SMP				Jumlah
	ASN		NON-ASN		ASN		NON-ASN		ASN		NON-ASN		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Barabai	2	21	14	249	100	225	56	71	20	68	23	33	921
Batang Alai Selatan	0	9	1	58	62	161	24	33	7	22	6	3	374
Batang Alai Timur	0	2	1	18	53	38	16	8	14	20	10	10	170
Batang Alai Utara	0	7	3	48	30	110	16	18	14	23	5	7	288
Batu Benawa	2	9	2	48	57	109	11	19	4	8	3	2	278
Hantakan	1	3	0	47	99	78	35	9	15	15	5	6	299
Haruyan	0	1	1	63	71	126	16	28	12	20	7	12	354
Labuan Amas Selatan	1	5	3	72	65	169	25	27	16	26	4	7	403
Labuan Amas Utara	1	4	1	56	85	161	24	43	21	25	11	13	409
Limpasu	0	5	1	54	53	80	11	20	9	9	1	7	211
Pandawan	0	7	2	54	73	190	27	36	7	15	3	4	415

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

Tabel. 2.1.2.4
Jumlah Lembaga yang dikelola Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	248	5	253
SMP	33	2	35
PAUD	37	247	284
Kesetaraan	1	12	13

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

2.1.3 Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan diperlukan sumber daya manusia yang handal dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai sarana dan prasarana yang berupa aset tetap berdasarkan Kartu Invebtaris Barang (KIB) terdiri dari:

Tabel. 2.1.3.1
Data Aset Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kode Golongan	Kode Bidang	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Barang per 30 Des 2024 (Rp.)
1	01	00	Tanah	412	27.760.689,08
2	02	02	Alat Angkutan	139	2.798.481,80
3	02	03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	542	325.413,16
4	02	01	Alat Besar	259	139.405,42
5	02	11	Alat Eksplorasi	24	7.575,00
6	02	05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.733	36.964.135,52
7	02	07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	346	640.430,16
8	02	15	Alat Keselamatan Kerja	234	327.789,32
9	02	08	Alat Laboratorium	21.121	21.404.898,95
10	02	16	Alat Peraga	22	14.434,00
11	02	09	Alat Persenjataan	176	311.365,90
12	02	04	Alat Pertanian	631	715.564,01
13	02	13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	7	4.064,00
14	02	06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.613	4.078.015,32
15	02	10	Komputer	12.158	42.626.026,50
16	02	19	Peralatan Olah Raga	8.342	4.548.282,83
17	02	18	Rambu-rambu	31	8.573,50
18	03	01	Bangunan Gedung	2.273	409.190.596,25
19	03	02	Monumen	1	500,00
20	03	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	22	1.923.337,01
21	04	02	Bangunan Air	149	11.421.727,56
22	04	03	Instalasi	86	1.716.805,58
23	04	01	Jalan dan Jembatan	6	123.795,84
24	04	04	Jaringan	23	199.076,06
25	05	01	Bahan Perpustakaan	1.063.273	52.129.839,82
26	05	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.392	1.552.094,31
27	05	06	Barang Koleksi Non Budaya	12	15.900,00
28	05	05	Tanaman	34	3.455,00
TOTAL				**1.199.061**	**620.952.271,88**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

Tabel. 2.1.3.2
Data Prasarana di Lingkungan Dinas Pendidikan Tahun 2025

No	Prasarana	SD			SMP			PAUD		
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan Kantor	33	120	37	20	15	0	52	104	30
2	Bangunan Ruang Belajar	563	985	17	81	182	1	192	112	110
3	Laboratorium	15	4	0	21	48	3	0	0	0
4	Perpustakaan	27	112	23	8	23	3	7	0	0
5	UKS	30	50	14	13	21	0	7	0	0
6	Prasarana dan Utilitas Sekolah	57	196	0	12	22	0	34	115	48
7	Tempat Ibadah	40	0	10	12	17	0	0	0	0
8	Rumah Dinas	2	24	0	0	0	0	0	0	0
9	Asrama Siswa	0	0	0	2	2	0	0	0	0
10	Bangunan Sanitary	24	101	37	37	100	10	35	138	24

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. HST Tahun 2025

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja**,** Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.4.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah		✔			8,00	8.13	8.26	8.39	8.52	8.01	8.28	8.29	8.35	98.52	100.24	98.81	98.00
2	Angka Harapan Lama Sekolah		✔			12,2	12.2	12.4	12.5	12.7	12.21	12.22	12.24	12.41	100.08	98.55	97.92	97.72
3	Angka Literasi (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca)		✔			0	42.25	44.75	58.92	61.72	49.41	56.11	64.92	69.09	116.95	125.39	110.18	111.94
4	Angka Numerasi (Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi)		✔			0	41.125	43.625	52.77	53.58	44.25	50.74	59.39	64.46	107.60	116.31	112.55	120.31
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan		✔			55,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		✔			99,01	99.05	99.1	99.15	99.2	99.42	99.75	89.09	90.09	100.37	100.66	89.85	90.82
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		✔			72,44	73	74	75	77	72.53	71.52	73.45	84.19	99.36	96.65	97.93	109.34
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A		✔			99,97	99.05	99.1	99.15	99.2	99.57	99.75	99.53	99.6	100.52	100.66	100.38	100.40
10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B		✔			91,20	73	74	75	77	91.12	90.59	90.79	91.2	124.82	122.42	121.05	118.44
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		✔			0,44	0	0	0	0	1.35	0.48	0,20	0.03	1.35	0.48	0,20	0.03
12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		✔			2,07	2.02	1.97	1.92	1.87	1.08	0.64	0.85	0.02	53.47	32.49	44.27	1.07
13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		✔			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		✔			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		✔			90,87	91.5	92	92.5	93	91.5	85.61	92.5	92.5	100.00	93.05	100.00	99.46
16	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik		✔			82,35	84	85.5	87	88.5	86	86	85.5	86	102.38	100.58	98.28	97.18
17	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik		✔			71,43	**100**	**100**	**100**	**100**	**77.14**	**85.71**	**88.57**	**89.57**	**77.14**	**85.71**	**88.57**	**89.57**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
18	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		✔			108,48	98.1	102.3	106.5	110.7	111.14	112.18	106.50	0.28	113.29	109.66	100.00	0.25
19	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		✔			28,17	30.2	32.35	34.5	35.7	45.05	46.48	12.32	2.55	149.17	143.68	35.71	7.14
20	Rasio guru terhadap murid pendidikan sekolah dasar		✔			0,049	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
21	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		✔			0,049	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 ; 12	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		✔			85.00	85.88	86.75	87.63	88.5	80	87.87	87.63	88	93.15	101.29	100.00	99.44

Tabel 2.1.4.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp0**	**Rp273,438,682,956**	**Rp271,759,189,355**	**Rp270,072,160,653**	**Rp295,182,541,580**	**Rp0**	**Rp255,968,780,564**	**Rp251,778,670,346**	**Rp249,763,409,642**	**Rp290,860,613,879**		**93.61%**	**92.65%**	**92.48%**	**98.54%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp0**	**Rp108,302,500**	**Rp16,467,500**	**Rp47,614,700**	**Rp60,000,000**	**Rp0**	**Rp106,357,600**	**Rp16,278,900**	**Rp46,554,800**	**Rp59,669,880**		**98.20%**	**98.85%**	**97.77%**	**99.45%**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp0	Rp108,302,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp106,357,600	Rp0	Rp0	Rp0		98.20%			#DIV/0!
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rp7,773,700	Rp11,397,700	Rp15,000,000			Rp7,671,850	Rp11,231,000	Rp14,951,060			98.69%	98.54%	99.67%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Rp7,528,200	Rp11,000,000				Rp7,325,500	Rp10,918,040				97.31%	99.25%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Rp11,879,000	Rp13,000,000				Rp11,500,200	Rp12,883,200				96.81%	99.10%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Rp3,809,500	Rp5,000,000				Rp3,735,000	Rp4,990,000				98.04%	99.80%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Rp3,184,200	Rp5,000,000				Rp3,128,400	Rp4,997,000				98.25%	99.94%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rp8,693,800	Rp9,816,100	Rp11,000,000			Rp8,607,050	Rp9,634,700	Rp10,930,580			99.00%	98.15%	99.37%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp0**	**Rp272,114,434,756**	**Rp267,937,244,555**	**Rp267,011,802,743**	**Rp290,296,977,920**	**Rp0**	**Rp254,718,269,770**	**Rp248,692,460,048**	**Rp246,982,530,255**	**Rp286,306,475,189**		**93.61%**	**92.82%**	**92.50%**	**98.63%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp272,092,764,256	Rp267,926,039,555	Rp267,001,157,943	Rp290,284,977,920		Rp254,716,670,770	Rp248,682,345,248	Rp246,971,967,455	Rp286,294,522,049		93.61%	92.82%	92.50%	98.63%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp21,670,500	Rp11,205,000	Rp10,644,800	Rp12,000,000		Rp1,599,000	Rp10,114,800	Rp10,562,800	Rp11,953,140		7.38%	90.27%	99.23%	99.61%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Rp0**	**Rp0**	**Rp247,463,000**	**Rp116,194,200**	**Rp68,000,000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp76,997,000**	**Rp82,336,250**	**Rp14,934,000**			**31.11%**	**70.86%**	**21.96%**
	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp62,133,200	Rp66,185,400	Rp45,700,000			Rp0	Rp52,799,750	Rp12,134,000			0.00%	79.78%	26.55%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp185,329,800	Rp50,008,800	Rp22,300,000			Rp76,997,000	Rp29,536,500	Rp2,800,000			41.55%	59.06%	12.56%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp0**	**Rp0**	**Rp16,900,000**	**Rp180,400,000**	**Rp74,900,000**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp2,467,500**	**Rp162,906,792**	**Rp59,250,000**			**14.60%**	**90.30%**	**79.11%**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Rp14,400,000	Rp14,400,000	Rp14,900,000			Rp0	Rp14,324,042	Rp0			0.00%	99.47%	0.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Rp166,000,000	Rp60,000,000				Rp148,582,750	Rp59,250,000				89.51%	98.75%
	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan			Rp2,500,000					Rp2,467,500					98.70%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp0**	**Rp755,141,700**	**Rp1,341,931,900**	**Rp483,358,560**	**Rp1,621,205,060**	**Rp0**	**Rp730,585,458**	**Rp1,198,385,643**	**Rp443,703,880**	**Rp1,531,134,580**		**96.75%**	**89.30%**	**91.80%**	**94.44%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp25,632,000	Rp44,838,700	Rp42,741,400	Rp46,996,400		Rp25,074,750	Rp44,751,000	Rp39,759,395	Rp43,823,957		97.83%	99.80%	93.02%	93.25%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp523,947,900	Rp755,806,100	Rp76,726,960	Rp661,978,160		Rp504,751,810	Rp678,030,180	Rp46,145,500	Rp652,723,600		96.34%	89.71%	60.14%	98.60%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp21,694,200	Rp79,637,800	Rp27,120,000	Rp57,856,000		Rp20,367,400	Rp64,639,400	Rp26,942,100	Rp135,504,080		93.88%	81.17%	99.34%	234.21%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Rp72,763,800					Rp69,147,600					95.03%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp57,812,100	Rp41,694,500	Rp39,619,200	Rp145,400,000		Rp57,313,920	Rp36,571,000	Rp39,617,200	Rp56,725,396		99.14%	87.71%	99.99%	39.01%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp2,400,000	Rp2,883,500	Rp3,152,000	Rp3,998,000		Rp2,400,000	Rp2,610,000	Rp2,880,000	Rp2,880,000		100.00%	90.51%	91.37%	72.04%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp30,500,000	Rp77,011,500	Rp45,000,000	Rp54,512,500		Rp28,364,650	Rp57,705,250	Rp40,235,300	Rp51,747,785		93.00%	74.93%	89.41%	94.93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp93,155,500	Rp267,296,000	Rp248,999,000	Rp639,664,000		Rp92,312,928	Rp244,931,213	Rp248,124,385	Rp584,068,562		99.10%	91.63%	99.65%	91.31%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Subkeg Baru)					Rp5,400,000					Rp2,452,100				#DIV/0!	45.41%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Subkeg Baru)					Rp5,400,000					Rp1,209,100				#DIV/0!	22.39%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp0**	**Rp0**	**Rp439,975,400**	**Rp741,500,700**	**Rp1,355,207,900**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp353,427,000**	**Rp683,648,300**	**Rp1,241,652,000**			**80.33%**	**92.20%**	**91.62%**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp153,412,800	Rp535,500,000	Rp759,356,200			Rp102,612,000	Rp506,100,000	Rp658,600,000			66.89%	94.51%	86.73%
	Pengadaan Mebel			Rp131,394,400	Rp42,450,600	Rp54,375,000			Rp129,914,000	Rp42,000,000	Rp54,000,000			98.87%	98.94%	99.31%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Subkeg Baru)			Rp155,168,200		Rp107,096,700			Rp120,901,000		Rp104,950,000			77.92%	#DIV/0!	98.00%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Rp163,550,100	Rp434,380,000				Rp135,548,300	Rp424,102,000				82.88%	97.63%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp0**	**Rp322,890,000**	**Rp658,203,400**	**Rp716,739,350**	**Rp617,978,900**	**Rp0**	**Rp281,464,234**	**Rp539,241,268**	**Rp681,373,991**	**Rp581,841,404**		**87.17%**	**81.93%**	**95.07%**	**94.15%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp6,095,000	Rp12,800,000	Rp10,175,750	Rp3,282,500		Rp6,050,000	Rp8,650,000	Rp3,450,000	Rp3,200,000		99.26%	67.58%	33.90%	97.49%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Rp171,400,000	Rp170,076,000	Rp198,000,000	Rp207,000,000		Rp132,816,634	Rp138,556,318	Rp174,653,191	Rp195,864,804		77.49%	81.47%	88.21%	94.62%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp145,395,000	Rp475,327,400	Rp508,563,600	Rp407,696,400		Rp142,597,600	Rp392,034,950	Rp503,270,800	Rp382,776,600		98.08%	82.48%	98.96%	93.89%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp0**	**Rp137,914,000**	**Rp1,101,003,600**	**Rp774,550,400**	**Rp1,088,271,800**	**Rp0**	**Rp132,103,502**	**Rp899,412,987**	**Rp680,355,374**	**Rp1,065,656,826**		**95.79%**	**81.69%**	**87.84%**	**97.92%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp91,746,000	Rp141,800,200	Rp87,009,600	Rp151,912,800		Rp86,196,502	Rp99,853,726	Rp82,920,344	Rp139,920,211		93.95%	70.42%	95.30%	92.11%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp46,168,000	Rp49,640,000	Rp45,380,000	Rp43,900,000		Rp45,907,000	Rp49,419,880	Rp44,854,125	Rp43,259,630		99.43%	99.56%	98.84%	98.54%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp909,563,400	Rp642,160,800	Rp892,459,000			Rp750,139,381	Rp552,580,905	Rp882,476,985			82.47%	86.05%	98.88%
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Rp0**	**Rp49,169,973,550**	**Rp135,384,240,900**	**Rp90,678,190,476**	**Rp125,586,567,366**	**Rp0**	**Rp45,520,823,422**	**Rp64,560,052,696**	**Rp80,107,423,462**	**Rp117,436,948,143**		**92.58%**	**47.69%**	**88.34%**	**93.51%**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Rp0**	**Rp19,010,448,550**	**Rp96,980,152,400**	**Rp41,360,794,940**	**Rp58,072,446,966**	**Rp0**	**Rp17,174,663,541**	**Rp35,754,626,173**	**Rp35,710,458,262**	**Rp53,266,844,969**		**90.34%**	**36.87%**	**86.34%**	**91.72%**
	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp2,666,380,500	Rp3,702,053,700	Rp2,962,542,050	Rp9,345,352,854		Rp2,629,395,924	Rp3,293,032,737	Rp2,540,609,395	Rp8,782,549,113		98.61%	88.95%	85.76%	93.98%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rp9,327,234,800	Rp5,134,461,496				Rp7,384,216,891	Rp4,875,338,714				79.17%	94.95%
	Pengadaan Mebel Sekolah			Rp169,660,000	Rp75,300,000	Rp261,659,700			Rp167,500,000	Rp71,110,000	Rp200,683,033			98.73%	94.44%	76.70%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				Rp875,783,000	Rp40,659,700				Rp600,430,000	Rp38,000,000				68.56%	93.46%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Rp280,681,000	Rp182,777,500	Rp248,625,130	Rp0		Rp245,461,234	Rp107,357,200	Rp228,789,526			87.45%	58.74%	92.02%	#DIV/0!
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			Rp325,899,500	Rp304,573,300	Rp0			Rp251,161,450	Rp303,077,120				77.07%	99.51%	#DIV/0!
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa		Rp19,560,000	Rp188,716,800	Rp968,970,800	Rp0		Rp0	Rp146,427,500	Rp697,726,588			0.00%	77.59%	72.01%	#DIV/0!
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp6,511,159,700	Rp61,399,881,400	Rp5,271,274,460	Rp3,061,920,200		Rp6,283,305,942	Rp5,212,612,450	Rp3,031,132,500	Rp3,031,132,500		96.50%	8.49%	57.50%	98.99%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp667,722,600	Rp1,681,298,400	Rp902,325,000	Rp863,041,600		Rp498,451,797	Rp1,434,476,000	Rp856,953,188	Rp856,953,188		74.65%	85.32%	94.97%	99.29%
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					**Rp85,932,400**					**Rp85,330,226**					**99.30%**
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					**Rp789,797,200**					**Rp699,972,507**					**88.63%**
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					**Rp552,190,900**					**Rp446,069,603**					**80.78%**
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					**Rp182,311,600**					**Rp158,577,001**					**86.98%**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp0	**Rp9,728,851,900**	**Rp15,889,178,200**	**Rp18,335,700,660**	**Rp32,082,731,200**	Rp0	**Rp8,796,835,690**	**Rp13,629,670,271**	**Rp16,114,494,319**	**Rp30,825,188,906**		**90.42%**	**85.78%**	**87.89%**	**96.08%**
	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Rp610,548,900**	**Rp1,096,027,600**	**Rp3,374,133,950**	**Rp2,162,304,000**		**Rp597,040,340**	**Rp882,543,655**	**Rp2,744,004,500**	**Rp2,135,014,000**		**97.79%**	**80.52%**	**81.32%**	**98.74%**
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah		**Rp3,750,131,200**	**Rp1,365,519,600**	**Rp800,000,000**	**Rp5,260,000,000**		**Rp3,261,644,050**	**Rp891,760,250**	**Rp595,175,700**	**Rp5,099,145,001**		**86.97%**	**65.31%**	**74.40%**	**96.94%**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Mebel Sekolah				Rp16,698,000	Rp0				Rp16,316,000	-			#DIV/0!	97.71%	#VALUE!
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Rp28,729,700		Rp337,474,500	Rp5,881,600,000		Rp23,224,500		Rp271,361,808	Rp5,602,612,567		80.84%	#DIV/0!	80.41%	95.26%
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Rp586,390,600					Rp580,385,000					98.98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyelenggaran Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik		Rp64,664,200	Rp382,261,200				Rp57,257,500	Rp274,661,891				88.55%	71.85%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp2,192,675,600	Rp1,110,105,000				Rp2,080,609,400	Rp962,121,713				94.89%	86.67%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Rp1,023,750,000	Rp134,838,200	Rp1,660,293,800			Rp1,005,625,000	Rp89,622,000	Rp1,656,695,000			98.23%	66.47%	99.78%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Rp200,000,000								#DIV/0!	#DIV/0!	0.00%
	Penyelengaraan Proses Belajar dan Mengajar				Rp159,803,900	Rp0				Rp123,987,369				#DIV/0!	77.59%	#DIV/0!
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Rp235,615,000	Rp0				Rp121,882,352				#DIV/0!	51.73%	#DIV/0!
	Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa		Rp25,896,100	Rp305,790,500	Rp606,125,200	Rp0		Rp5,561,000	Rp212,409,692	Rp482,211,700			21.47%	69.46%	79.56%	#DIV/0!
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp2,192,675,600	Rp2,292,198,000	Rp441,487,910	Rp364,597,600		Rp2,080,609,400	Rp2,202,234,850	Rp326,987,629	Rp344,506,350		94.89%	96.08%	74.06%	94.49%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp277,140,000	Rp2,910,658,300	Rp6,690,024,000	Rp6,804,540,500		Rp110,504,500	Rp2,187,399,345	Rp5,941,521,296	Rp6,714,608,950		39.87%	75.15%	88.81%	98.68%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Rp5,402,868,000	Rp5,539,500,000				Rp5,010,913,875	Rp5,401,423,965				92.75%	97.51%	#DIV/0!
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					Rp5,260,000,000					Rp5,099,145,001			#DIV/0!	#DIV/0!	96.94%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					**Rp590,336,500**					**Rp525,183,550**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**88.96%**
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					**Rp19,990,000**					**Rp8,055,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**40.30%**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					**Rp2,388,956,800**					**Rp2,272,530,008**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**95.13%**
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik					**Rp190,912,000**					**Rp181,146,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**94.88%**
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					**Rp33,000,000**					**Rp31,900,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**96.67%**
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan					**Rp50,000,000**					**Rp35,003,600**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**70.01%**
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan					**Rp25,000,000**					**Rp19,922,500**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**79.69%**
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					**Rp25,000,000**					**Rp16,066,200**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**64.26%**
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					**Rp18,000,000**					**Rp8,805,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**48.92%**
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					**Rp30,000,000**					**Rp25,950,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**86.50%**
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					**Rp180,000,000**					**Rp151,141,878**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**83.97%**
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi					**Rp918,200,000**					**Rp882,338,301**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**96.09%**
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatann Kapasitas Bidang Pendidikan					**Rp20,000,000**					**Rp15,420,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**77.10%**
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp0	**Rp17,468,260,100**	**Rp18,713,896,400**	**Rp12,173,545,676**	**Rp14,894,998,400**	Rp0	**Rp16,616,791,791**	**Rp13,490,684,770**	**Rp10,633,011,736**	**Rp13,818,937,180**		**95.13%**	**72.09%**	**87.35%**	**92.78%**
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				**Rp1,083,600**	**Rp0**				**Rp -**				**#DIV/0!**	**#VALUE!**	**#DIV/0!**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD		Rp176,212,100	Rp267,251,200	Rp452,672,000	Rp0		Rp170,628,900	Rp239,596,761	Rp305,362,400			96.83%	89.65%	67.46%	#DIV/0!
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Rp300,461,500	Rp230,000,000	Rp15,000	Rp1,154,361,000		Rp249,610,040	Rp226,897,300	Rp -	Rp1,058,205,933		83.08%	98.65%	#VALUE!	91.67%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD				Rp131,415,000	Rp1,408,213,300				Rp93,566,700	Rp1,331,921,296			#DIV/0!	71.20%	94.58%
	Pengadaan Mebel PAUD				Rp5,000	Rp0				Rp -				#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Rp79,400					Rp -				#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				Rp8,000	Rp200,000,000				Rp -	Rp199,066,400			#DIV/0!	#VALUE!	99.53%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Rp11,911,481,100	Rp12,726,343,900	Rp5,467,878,800	Rp5,197,150,000		Rp11,590,538,300	Rp12,460,348,650	Rp4,622,609,700	Rp4,581,871,624		97.31%	97.91%	84.54%	88.16%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Rp52,559,000	Rp193,837,500	Rp34,387,000	Rp245,445,000		Rp34,028,301	Rp42,621,546	Rp20,971,650	Rp129,144,163		64.74%	21.99%	60.99%	52.62%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Rp4,960,304,900	Rp5,193,804,800	Rp6,086,001,876	Rp0		Rp4,523,806,250	Rp460,335,513	Rp5,590,501,286			91.20%	8.86%	91.86%	#DIV/0!
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					Rp630,000,000					Rp595,098,614			#DIV/0!	#DIV/0!	94.46%
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					Rp113,006,600					Rp100,588,625			#DIV/0!	#DIV/0!	89.01%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					Rp4,476,000,000					Rp4,406,188,819			#DIV/0!	#DIV/0!	98.44%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Rp67,241,500	Rp102,659,000		Rp310,200,000		Rp48,180,000	Rp60,885,000		Rp309,404,436		71.65%	59.31%	#DIV/0!	99.74%
	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan					Rp150,000,000					Rp150,000,000			#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan					Rp255,000,000					Rp255,000,000			#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					Rp218,842,500					Rp176,351,244			#DIV/0!	#DIV/0!	80.58%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan					Rp89,880,000					Rp81,769,600			#DIV/0!	#DIV/0!	90.98%
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan					Rp150,000,000					Rp150,000,000			#DIV/0!	#DIV/0!	100.00%
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan					Rp296,900,000					Rp294,326,426			#DIV/0!	#DIV/0!	99.13%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp0	Rp2,962,413,000	Rp3,801,013,900	Rp18,808,149,200	Rp20,536,390,800	Rp0	Rp2,932,532,400	Rp1,685,071,482	Rp17,649,459,145	Rp19,525,977,088		98.99%	44.33%	93.84%	95.08%
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan				Rp1,200,000					Rp -				#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
	Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Rp209,700,000	Rp850,000,000				Rp206,902,500	Rp664,617,300				98.67%	78.19%	#DIV/0!
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana. Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Rp104,500					Rp -				#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan				Rp400					Rp -				#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan		Rp495,752,500	Rp124,157,800	Rp328,147,500			Rp467,056,400	Rp94,852,743	Rp294,987,504			94.21%	76.40%	89.89%	#DIV/0!
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Rp577,009,600	Rp14,116,636,000	Rp16,584,517,200			Rp570,000,000	Rp13,279,990,000	Rp15,806,235,058			98.79%	94.07%	95.31%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Rp329,747,000	Rp269,000,000				Rp254,654,039	Rp201,750,699				77.23%	75.00%	#DIV/0!
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			Rp704,500	Rp1,600				Rp0	Rp -				0.00%	#VALUE!	#DIV/0!
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Rp2,466,660,500	Rp2,559,695,000	Rp3,243,059,200			Rp2,465,476,000	Rp558,662,200	Rp3,208,113,642			99.95%	21.83%	98.92%	#DIV/0!
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan					Rp3,560,214,000					Rp3,403,533,700			#DIV/0!	#DIV/0!	95.60%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan					Rp232,137,000					Rp194,060,245			#DIV/0!	#DIV/0!	83.60%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Non Formal Kesetaraan					**Rp73,617,600**					**Rp70,550,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**95.83%**
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					**Rp45,256,000**					**Rp15,787,275**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**34.88%**
	Pembangunan Ruang Kelas Baru					**Rp40,649,000**					**Rp35,810,810**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**88.10%**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rp0	**Rp68,893,500**	**Rp114,645,200**	**Rp3,804,000**	**Rp0**	Rp0	**Rp46,222,600**	**Rp52,487,900**	**Rp3,723,600**	**Rp0**		**67.09%**	**45.78%**	**97.89%**	**#DIV/0!**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp0	**Rp27,088,200**	**Rp39,550,000**	**Rp3,804,000**	**Rp0**	Rp0	**Rp25,280,300**	**Rp33,327,900**	**Rp3,723,600**	**Rp0**		**93.33%**	**84.27%**	**97.89%**	**#DIV/0!**
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		**Rp27,088,200**	**Rp39,550,000**	**Rp3,804,000**			**Rp25,280,300**	**Rp33,327,900**	**Rp3,723,600**			**93.33%**	**84.27%**	**#REF!**	**#DIV/0!**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp0	**Rp41,805,300**	**Rp75,095,200**	**Rp0**	**Rp0**	Rp0	**Rp20,942,300**	**Rp19,160,000**	**Rp0**	**Rp0**		**50.09%**	**25.51%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		**Rp21,492,800**	**Rp75,095,200**				**Rp10,883,650**	**Rp19,160,000**				**50.64%**	**25.51%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		**Rp20,312,500**					**Rp10,058,650**					**49.52%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp0	**Rp0**	**Rp1,092,174,500**	**Rp206,991,600**	**Rp282,463,350**	Rp0	**Rp0**	**Rp983,024,731**	**Rp167,211,600**	**Rp247,470,700**			**90.01%**	**80.78%**	**87.61%**
	Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pernhditiudnikgann dan Pemetaan	Rp0	**Rp0**	**Rp1,092,174,500**	**Rp206,991,600**	**Rp282,463,350**	Rp0	**Rp0**	**Rp983,024,731**	**Rp167,211,600**	**Rp247,470,700**			**90.01%**	**80.78%**	**87.61%**
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**Rp1,092,174,500**	**Rp206,991,600**	**Rp269,738,350**			**Rp983,024,731**	**Rp167,211,600**	**Rp236,085,700**			**90.01%**	**80.78%**	**87.52%**
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar					**Rp12,725,000**					**Rp11,385,000**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**89.47%**
	Program Pembinaan Sejarah	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp94,108,500**	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp88,637,990**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**94.19%**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp94,108,500**	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp88,637,990**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**94.19%**
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten Kota					**Rp94,108,500**					**Rp88,637,990**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**94.19%**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp0	**Rp250,124,600**	**Rp492,567,900**	**Rp965,869,300**	**Rp1,643,692,000**	Rp0	**Rp188,706,628**	**Rp483,985,947**	**Rp946,132,336**	**Rp1,636,615,844**		**75.45%**	**98.26%**	**97.96%**	**99.57%**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	**Rp250,124,600**	**Rp492,567,900**	**Rp965,869,300**	**Rp1,643,692,000**	Rp0	**Rp188,706,628**	**Rp483,985,947**	**Rp946,132,336**	**Rp1,636,615,844**		**75.45%**	**98.26%**	**97.96%**	**99.57%**
	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		**Rp250,124,600**	**Rp492,567,900**	**Rp965,869,300**	**Rp1,643,692,000**		**Rp188,706,628**	**Rp483,985,947**	**Rp946,132,336**	**Rp1,636,615,844**		**75.45%**	**98.26%**	**97.96%**	**99.57%**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp0	**Rp0**	**Rp559,434,600**	**Rp337,320,000**	**Rp527,164,000**	Rp0	**Rp0**	**Rp543,407,095**	**Rp337,029,129**	**Rp522,901,750**			**97.14%**	**99.91%**	**99.19%**
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	**Rp0**	**Rp559,434,600**	**Rp337,320,000**	**Rp527,164,000**	Rp0	**Rp0**	**Rp543,407,095**	**Rp337,029,129**	**Rp522,901,750**			**97.14%**	**99.91%**	**99.19%**
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			**Rp559,434,600**	**Rp337,320,000**	**Rp527,164,000**			**Rp543,407,095**	**Rp337,029,129**	**Rp522,901,750**			**97.14%**	**99.91%**	**99.19%**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp0	**Rp172,671,400**	**Rp395,296,100**	**Rp142,380,200**	**Rp147,973,694**	Rp0	**Rp123,593,000**	**Rp372,178,142**	**Rp136,826,700**	**Rp147,555,858**		**71.58%**	**94.15%**	**96.10%**	**99.72%**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Rp0	**Rp172,671,400**	**Rp395,296,100**	**Rp142,380,200**	**Rp147,973,694**	Rp0	**Rp123,593,000**	**Rp372,178,142**	**Rp136,826,700**	**Rp147,555,858**		**71.58%**	**94.15%**	**96.10%**	**99.72%**
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		**Rp172,671,400**	**Rp395,296,100**	**Rp142,380,200**	**Rp147,973,694**		**Rp123,593,000**	**Rp372,178,142**	**Rp136,826,700**	**Rp147,555,858**		**71.58%**	**94.15%**	**96.10%**	**99.72%**
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp313,225,000**	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp311,637,867**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**99.49%**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp313,225,000**	Rp0	**Rp0**	**Rp0**	**Rp0**	**Rp311,637,867**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**99.49%**
	Pelindungan Cagar Budaya					**Rp313,225,000**					**Rp311,637,867**			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**99.49%**

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan besar dalam menunjang pencapaian visi/misi Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan harus dapat membaca dengan cermat tantangan yang dihadapi dari luar, begitu juga peluang-peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperlancar pencapaian tujuan pembangunan. Yang dimaksud dengan tantangan dari luar adalah tantangan yang sumbernya berasal dari luar Dinas Pendidikan.

a. Tantangan

Secara umum, Tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 - 2029 akan semakin kompleks. Tantangan tersebut berupa tantangan dari dalam wilayah (tantangan internal) maupun tantangan dari luar wilayah (tantangan eksternal). Berikut ini adalah beberapa tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan pendidikan 5 (lima) tahun yang akan datang.

I. Perwujudan Ekosistem Pendidikan Berkarakter

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah yaitu mendukung Visi dan MisiPresiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Terbentuknya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global sebagai berikut :

- Sekolah yang Kondusif;
- Guru sebagai Penyemangat;
- Orang Tua yang Terlibat Aktif;
- Masyarakat yang Sangat Peduli;Industri yang Berperan Penting;
- Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar;
- Pemerintah yang Berperan Optimal.

Keterlibatan tujuh elemen ekosistem pendidikan secara aktif dan terintegrasi antara sekolah, guru, orang tua, masyarakat, industri, organisasi profesi, dan pemerintah perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan karena masing - masing elemen tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dan memiliki keterkaitan dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan menciptakan insan yang berkarakter dan insan yang cerdas (spiritual, emosional dan sosial, intelektual, serta kinestetis).

II. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Dengan adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan

pendidikan berupa pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal. Sementara itu Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan Pemerintah Pusat diberikan kewenangan dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan tinggi.

Pembagian urusan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berimplikasi pada meningkatnya tanggung jawab bagi masing-masing komponen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan sesuai dengan kewenangannya secara baik dan optimal yang berdampak pada terwujudnya kemajuan wilayah dan masyarakatnya. Berkaitan dengan urusan pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk dapat melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal secara berkualitas yang dapat diakses secara luas dan merata oleh masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan tujuan tahun 2025 - 2030 dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan nasional, yaitu : Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;

1. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
2. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan;
4. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;

Sasaran Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 - 2030, yaitu :

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang;
3. Menguatnya karakter peserta didik;
4. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5. Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai salah satu komponen Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan, selain tujuan strategis ke-3 yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

III. Pendidikan Anak Usia Dini

Tantangan berikutnya adalah masih banyaknya anak usia sekolah jenjang PAUD yang tidak sekolah atau belum sekolah. Pembangunan pendidikan harus mampu menjangkau mereka untuk meningkatkan APK dan APM,

khususnya pada jenjang pendidikan PAUD. Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu bersinergi dengan perangkat daerah yang lain untuk mengidentifikasi dan mengajak anak usia sekolah PAUD yang yang belum sekolah untuk bersekolah.

IV. Pendidikan Dasar

Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, periode 2021-2024 menunjukkan tren penurunan, walaupun APTS mengalami fluktuatif tetapi memiliki tren menurun antara lain keberhasilan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

V. Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Dari tahun ke tahun, Dinas Pendidikan mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolah dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM). Untuk jenjang SD dan SMP semua Satuan Pendidikan telah terakreditasi, sedang untuk Lembaga PAUD masih ada 8 (delapan) satuan Pendidikan baru yang belum terakreditasi . Hanya saja capaian akreditasi Lembaga PAUD masih banyak berada pada nilai kategori C, padahal sesuai dengan standar pelayanan minimal tingkat akreditasi satuan Pendidikan PAUD minimal B.

Untuk memastikan semua satuan Pendidikan PAUD terakreditasi dan terjadi peningkatan capaian nilai kategori akreditasi perlu dilakukan optimalisasi proses akreditasi, dengan cara melakukan pendampingan.

VI. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses penilaian dan pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti formal yang mengakui guru telah memenuhi standar profesional dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Sertifikasi guru ini dikenal juga dengan istilah Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Proses PPG ini memerlukan waktu 6 bulan dan melibatkan LPTK sebagai pelaksananya disertai Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan. Sehingga mutu dan profesionalisme guru dapat lebih terjamin.

VII. Pelestarian dan Pengembangan Serta Tantangan Kebudayaan

Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kebudayaan

1. Tekanan modernisasi dan globalisasi yang dapat mempengaruhi eksistensi kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Kurangnya minat generasi muda terhadapan nilai adat dan budaya
3. Kurangnya infrastruktur yang dapat mendukung

Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

4. Dokumentasi sejarah lokal masih minim sehingga berpotensi hilang
5. Masih terbatasnya digitalisasi arsip budaya naskah dan sejarah lokal
6. Belum semua masyarakat pentingnya menjaga dan menghidupkan budaya lokal
7. Belum adanya regulasi yang kuat tentang pelestarian budaya daerah
8. Masih rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan

Sementara indeks pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan (khusunya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah) padahal Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan lumbung seniman dan budayawan

VIII. Tantangan Tentang Pendidikan

1. Masih rendahnya capaian dan peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
2. Masihnya rendahnya kualitas pendidikan
3. Masih tingginya angka tidak sekolah (Putus Sekolah/tidak melanjutkan/tidak pernah bersekolah)
4. Masih rendahnya indeks distribusi guru
5. Kurangnya tenaga kependidikan yang berstatus ASN
6. Masih kurangnya beberapa guru mata Pelajaran tertentu
7. Masihnya rendahnya kualitas Kompetensi Guru
8. Masih terdapat beberapa ASN GTK yang kualifikasi pendidikannya di bawah ketentuan (S1/D4)
9. Budaya dan animo masyarakat yang cenderung bersekolah ke satuan Pendidikan yang bercorak keagamaan
10. Infrastruktur yang belum memadai

b. Peluang

Di samping tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam lima tahun mendatang, secara umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan di bumi murakata. Berikut ini beberapa peluang yang dapat dioptimalkan dalam pembangunan pendidikan.

I. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan yang Lebih Spesifik

Pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mendorong Pemerintah Kabupaten Kendal untuk lebih mampu mengkonsentrasikan perhatiannya pada pengembangan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan non formal. Alokasi d0ana yang semula dialokasikan untuk pengembangan pendidikan menengah (SMA/SMK) dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan non formal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

II. Regulasi Daerah Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu peran strategis dunia usaha/perusahaan untuk mendukung agenda pembangunan di daerah dengan memberikan manfaat sosial, ekonomi, maupun lingkungan bagi masyarakat sekitar maupun seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan dunia usaha tersebut. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai wilayah yang memiliki kawasan industri perbankan, perdagangan dan pergudangan memiliki potensi untuk mengoptimalkan peranan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam mendukung pengembangan berbagai aspek dunia pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hanya saja keterlibatan mereka dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Perhatian dunia usaha melalui TSP diharapkan dapat dioptimalkan agar sejalan dengan perwujudan ekosistem pendidikan dengan memberikan peran yang lebih aktif kepada seluruh elemen ekosistem termasuk di antaranya pihak industri atau dunia usaha dalam pembangunan pendidikan. Perlu diupayakan regulasi setingkat peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka mendorong penciptaan ekosistem tersebut.

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program dan dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara, peran industri menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan undang- undang yang mengaturnya.

Secara khusus, peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meliputi:

1. Adanya peraturan perundang–undangan sebagai payung hukum dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. Diterbitkanya Perda/Perbup sebagai regulasi dalam bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan;
3. Adanya program prioritas kepala daerah terpilih untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan serta pelestarian kebudayaan sebagai komitmen untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan;
5. Dukungan Organisasi profesi bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai pemersatu dan kontrol serta sarana peningkatan kemampuan profesional anggotanya;
6. Adanya kegiatan pendampingan akreditasi satuan pendidikan, Sekolah ramah anak, dan sekolah adiwiyata untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan:
7. Berdirinya lembaga Pendidikan Informal dan Nonformal;

8. Dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang terhadap peningkatan kualitas akses dan mutu pendidikan;
9. Tingginya solidaritas antar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing, dan berkualitas hidup tinggi yang religius serta berbudaya

2.1.6 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran umum, kelompok sasaran layanan utama Dinas Pendidikan sangat beragam, mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam ekosistem pendidikan. Kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Peserta Didik dan Orang Tua/Wali Murid
   Ini adalah kelompok sasaran paling inti dan utama dari seluruh pelayanan Dinas Pendidikan.
   - Peserta Didik: Mulai dari anak usia dini hingga siswa SMP. Mereka adalah penerima langsung dari program pendidikan, beasiswa, dan dukungan kurikuler.
   - Orang Tua/Wali Murid: Berinteraksi dengan dinas terkait pendaftaran siswa baru (PPDB), penanganan masalah siswa, dan partisipasi dalam program sekolah.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
   PTK adalah mitra strategis yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan.
   - Guru: Sasaran utama layanan pembinaan, sertifikasi, pelatihan, dan manajemen karir.
   - Kepala Sekolah: Sasaran layanan pembinaan manajerial, kepemimpinan, dan pengelolaan sekolah.
   - Staf Kependidikan: Sasaran layanan administrasi, pengurusan kepegawaian, dan pengembangan kompetensi.
3. Sekolah (Sebagai Institusi)
   Sekolah, baik negeri maupun swasta, adalah unit operasional yang menjadi fokus utama layanan.
   - Sekolah (PAUD, SD, SMP) : Penerima layanan sarana-prasarana, bantuan operasional, dan izin pendirian/operasional.
   - Komite Sekolah : Mitra yang berinteraksi dengan dinas dalam perencanaan, pengawasan, dan dukungan kegiatan sekolah.
   - Dewan Pendidikan : sebuah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli terhadap dunia pendidikan. Lembaga ini dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.
4. Masyarakat dan Komunitas
   Dinas Pendidikan juga melayani masyarakat luas yang memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan.
   - Masyarakat Umum: Berinteraksi dengan dinas dalam layanan informasi publik, pengaduan, atau permohonan rekomendasi.
   - Penyelenggara Pendidikan Non-Formal: Penerima layanan pembinaan dan dukungan bagi program pendidikan

kesetaraan (Paket A, B, C) atau kegiatan pembelajaran di luar sekolah.

- Pelaku Usaha dan Dunia Industri: Berinteraksi dengan dinas dalam program magang, pengembangan keahlian, dan program CSR terkait pendidikan.

secara kewilayahan. Apabila disesuaikan dengan tupoksi Bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kelompok sasaran pelayanan dari masing-masing bidang dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.1.6.1
Kelompok Sasaran Layanan Berdasarkan Tupoksi Bidang
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten HST

Bidang	Tupoksi (Umum)	Kelompok Sasaran
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)	mengelola dan membina seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar mengelola perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang Sekolah Dasar	Peserta Didik (siswa) Sekolah Dasar. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (guru, kepala sekolah, dan staf) di jenjang Sekolah Dasar. Sekolah Dasar (sebagai institusi). Komite Sekolah dan orang tua/wali murid di jenjang Sekolah Dasar. Semua sekolah jenjang Sekolah Dasar Warga sekolah (siswa dan guru) sebagai pengguna sarana dan prasarana.
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	mengelola dan membina seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama mengelola perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik (siswa) Sekolah Menengah Pertama. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (guru, kepala sekolah, dan staf) di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sekolah Menengah Pertama (sebagai institusi). Komite Sekolah dan orang tua/wali murid di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Semua Sekolah Menengah Pertama. Warga sekolah (siswa dan guru) sebagai pengguna sarana dan prasarana.

Bidang	Tupoksi (Umum)	Kelompok Sasaran
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF)	• mengelola dan membina pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan di luar sekolah formal • mengelola perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Anak Usia Dini (peserta didik PAUD). Tenaga Pendidik dan Kependidikan di lembaga PAUD. Masyarakat dan warga belajar di lembaga pendidikan non-formal (misalnya, PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar). Lembaga PAUD dan Pendidikan Non-Formal. Penyelenggara pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Semua sekolah PAUD dan Kesetaraan Nonformal Warga sekolah (siswa dan guru) sebagai pengguna sarana dan prasarana
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Kebudayaan	• mengelola, membina, dan mengembangkan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang (PAUD, SD, SMP) • melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan daerah. Meskipun kadang berdiri sebagai dinas terpisah, fungsinya sering menjadi bagian dari Dinas Pendidikan.	Guru (PNS, PPPK, honorer) dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Tenaga Kependidikan (kepala sekolah, staf administrasi, pustakawan, laboran) dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pelaku seni dan budaya (seniman, budayawan, komunitas seni, kelompok adat). Masyarakat umum (sebagai penikmat dan partisipan kegiatan budaya). Lembaga/komunitas adat dan sanggar seni. Pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi penerus kebudayaan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2..2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan subyek utama pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Namun, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang hanya sebesar 70,69 pada tahun 2024. Angka ini menduduki peringkat ke sepuluh dari tiga belas Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mencapai 73,03 .

Dimensi pendidikan sebagai salah satu indikator pengukuran IPM, memiliki 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masih rendahnya kontribusi pendidikan dalam capaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersumber dari masih kurang tersedianya kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan secara merata. Sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan, APM dan APS menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan mendasar pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui bidang pendidikan. Permasalahan terkait rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, selayaknya telah teratasi sejak beberapa periode pembangunan lalu, mengingat pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini telah membawa perubahan sangat besar pada kehidupan dan peradaban umat manusia, dan hal tersebut membawa tantangan serius bagi dunia pendidikan untuk tidak sekedar menenuhi akses terhadap pendidikan, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan guna mengimbangi dinamika perkembangan kehidupan dan peradaban masyarakat. Terkait dengan upaya tersebut, berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan pendidikan perlu dibenahi dan dikelola dengan baik, serta sejumlah permasalahan yang muncul mengiringinya perlu diatasi dan dicarikan pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan berhasil diidentifikasi dalam upaya membangun pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah sangat kecil/tidak signifikan	Masih ada anak yang putus sekolah, Tidak melanjutkan sekolah, dan belum pernah bersekolah (BPB)	Faktor ekonomi dan kemiskinan, pernikahan dini, lingkungan sosial budaya, masalah akses geografis, dan tingkat pendidikan orang tua serta masih terbatasnya tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus
2	Kemampuan dasar literasi dan numerasi siswa masih rendah	Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung .	Kualitas pembelajaran belum optimal, lingkungan belajar kurang mendukung dan faktor sosial budaya
3	Banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah	Faktor Ekonomi dan Keluarga Faktor Sosial dan Lingkungan Faktor Individu dan Sekolah	• Biaya pendidikan • Kebutuhan untuk bekerja • Kurangnya pemahaman orang tua • Belum tersedianya lahan untuk relokasi sekolah dari daerah rawan bencana dan pembangunan unit sekolah baru di lokasi yang strategis untuk menjangkau seluruh masyarakat • Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti revitalisasi bangunan yang sudah tua dan tidak layak, serta pemenuhan fasilitas penunjang (area bermain, perpustakaan, tempat ibadah). Faktor Sosial dan Lingkungan • Jarak ke sekolah • Lingkungan yang kurang mendukung • Perundungan (bullying • Kecanduan gadget dan game online Faktor Individu dan Sekolah • Kurangnya minat belajar • Kondisi khusus • Sistem sekolah yang tidak ramah
4	Rendahnya rasio guru : siswa pada jenjang SD dan meningkatnya rasio guru : siswa pada jenjang SMP	Proliferasi sekolah kecil (pada jenjang SD): Beberapa sekolah dasar dengan jumlah siswa sangat sedikit, terutama di daerah berpenduduk jarang. Setiap sekolah, sekecil apapun, tetap membutuhkan jumlah guru minimum (guru kelas, guru agama, guru PJOK), yang secara sistematis menghasilkan rasio guru : siswa menjadi rendah. Kekosongan guru mata pelajaran tertentu (pada jenjang SMP): Sekolah kesulitan mengisi formasi untuk mata pelajaran tertentu seperti PJOK, PPKn, TIK/Informatika, dan Seni Budaya, yang akhirnya diisi oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi linear, sehingga menurunkan kualitas pengajaran. Defisit guru secara agregat: terjadi kekurangan jumlah guru SMP secara keseluruhan di kabupaten, dan defisit di kecamatan-kecamatan tertentu. Beban mengajar guru berlebihan: Guru yang ada harus menangani jumlah siswa yang melebihi kapasitas ideal, sehingga mengurangi kemampuan guru untuk memberikan perhatian individual dan melakukan evaluasi yang mendalam.	Preferensi guru dan lemahnya sistem penempatan: • Adanya kecenderungan alami bagi guru untuk memilih bertugas di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas dan akses lebih baik. Hal ini tidak diimbangi oleh sistem mutasi, rotasi, dan insentif yang kuat dan berbasis data untuk mendistribusikan guru secara merata.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa masalah pokok pertama adalah Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah sangat kecil/tidak signifikan hal tersebut dikerenakan Masih ada anak yang putus sekolah, Tidak melanjutkan sekolah, dan belum pernah bersekolah (BPB) .Hal ini terjadi dikerenakan Faktor ekonomi dan kemiskinan, pernikahan dini, lingkungan sosial budaya, masalah akses geografis, dan tingkat pendidikan orang tua serta masih terbatasnya tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus.

Tantangan pengadaan tanah ini juga menjadi penyebab langsung dari masalah kedua, yaitu Mutu Pendidikan yang belum optimal. Mutu pendidikan terhambat karena keterbatasan lahan untuk membangun atau mengembangkan fasilitas sesuai Standar Nasional Pendidikan. Beberapa sekolah memerlukan pembebasan lahan untuk revitalisasi total bangunan yang sudah tua dan tidak layak, serta untuk memenuhi standar fasilitas penunjang seperti area bermain, perpustakaan, dan ruang kelas yang representatif. Tanpa pengadaan tanah yang efektif, upaya peningkatan kualitas sarana belajar menjadi tidak mungkin dilakukan.

Pokok masalah kedua, Kemampuan dasar literasi dan numerasi siswa masih rendah. Masalahnya adalah Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca dan berhitung. Akar masalahnya tersebut yaitu Kualitas pembelajaran belum optimal, lingkungan belajar kurang mendukung dan faktor sosial budaya.

Pokok masalah ketiga yaitu Banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah. Masalahnya adalah Faktor Ekonomi dan Keluarga, Faktor Sosial dan Lingkungan, Faktor Individu dan Sekolah. Akar masalahnya adalah

Faktor Ekonomi dan Keluarga
- Biaya pendidikan
- Kebutuhan untuk bekerja
- Kurangnya pemahaman orang tua

Faktor Sosial dan Lingkungan
- Jarak ke sekolah
- Lingkungan yang kurang mendukung
- Perundungan (bullying
- Kecanduan gadget dan game online

Faktor Individu dan Sekolah
- Kurangnya minat belajar
- Kondisi khusus
- Sistem sekolah yang tidak ramah.

Akar masalah selanjutnya Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan, seperti revitalisasi bangunan yang sudah tua dan tidak layak, serta pemenuhan fasilitas penunjang (area bermain, perpustakaan, tempat ibadah).

Pokok masalah yang terakhir , Rendahnya rasio guru : siswa pada jenjang SD dan meningkatnya rasio guru : siswa pada jenjang SMP. Masalahnya adalah :

- Proliferasi sekolah kecil (pada jenjang SD)
  Beberapa sekolah dasar dengan jumlah siswa sangat sedikit, terutama di daerah berpenduduk jarang. Setiap sekolah, sekecil apapun, tetap membutuhkan jumlah guru minimum (guru kelas, guru agama, guru PJOK), yang secara sistematis menghasilkan rasio guru : siswa menjadi

rendah.

- Kekosongan guru mata pelajaran tertentu (pada jenjang SMP)
  Sekolah kesulitan mengisi formasi untuk mata pelajaran tertentu seperti PJOK, PPKn, TIK/Informatika, dan Seni Budaya, yang akhirnya diisi oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi linear, sehingga menurunkan kualitas pengajaran. Defisit guru secara agregat: terjadi kekurangan jumlah guru SMP secara keseluruhan di kabupaten, dan defisit di kecamatan-kecamatan tertentu.
- Beban mengajar guru berlebihan
  Guru yang ada harus menangani jumlah siswa yang melebihi kapasitas ideal, sehingga mengurangi kemampuan guru untuk memberikan perhatian individual dan melakukan evaluasi yang mendalam.

Akar masalahnya tersebut yaitu Preferensi guru dan lemahnya sistem penempatan Adanya kecenderungan alami bagi guru untuk memilih bertugas di wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas dan akses lebih baik. Hal ini tidak diimbangi oleh sistem mutasi, rotasi, dan insentif yang kuat dan berbasis data untuk mendistribusikan guru secara merata.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan suatu gambaran utuh sebagai tujuan akhir pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara madani, konsisten, dan merata. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan.

“TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Visi tersebut mencerminkan tekad untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan menanamkan nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan yang merata, serta menjunjung tinggi martabat daerah dalam pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini menjadi landasan utama dalam mempersiapkan Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik yang kokoh di masa depan. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 (empat) elemen utama yang menjadi pilar pembangunan:

- ✔ **Religius** menggambarkan Pemerintahan yang jujur, adil, bermanfaat dan disiplin serta Masyarakat yang aman dan tenteram dengan berlandaskan Agama
- ✔ **Sejahtera** menggambarkan kehidupan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkecukupan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan Tingkat kemiskinan yang rendah**Bermartabat** menggambarkan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang maju, berdaya saing serta unggul dalam aspek kualitas Sumber Daya Manusia, Perkekonomian, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dibandingkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

B. Misi

Misi merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjaga komitmen dan konsistensi kinerja yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

C. Program Kerja.

Program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bidang kebudayaan ada pada misi pertama **“Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai – Nilai Spritual dan Kultural”**. Dengan program kerjanya:

1. Menguatkan dan meningkatkan eksistensi kebudayaan dengan mendorong berkembangnya kesenian dan budaya yang ada di Hulu Sungai Tengah;
2. Mengadakan event kesenian guna mengenali budaya sendiri sebagai bentuk pelestarian budaya.

Selanjutnya dalam kaitannya tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bidang pendidikan ada pada misi ke tiga **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia”**. Dengan program kerjanya:

1. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui pelatihan rutin dan penguasaan teknologi informasi;
2. Meningkatkan tunjangan kepada guru;
3. Memberikan beasiswa pendidikan bagi putera dan puteri terbaik Hulu Sungai Tengah;
4. Mengembangkan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata;
5. Rotasi guru dan kepala sekolah untuk peningkatan dan pemerataan kualitas sekolah dengan menempatakan tenaga pendidik berkinerja terbaik di medan tersulit.

2.2.3 Isu-Isu Strategis Pada Tingkatan Global, Nasional, Regional dan Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan adalah tantangan dan peluang yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Isu-isu ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, dari yang paling luas (global) hingga yang paling spesifik (daerah). Berikut adalah perinciannya

Tabel 2.2.3.1
Isu-Isu Strategis pada Berbagai Tingkatan
(Global, Nasional, Regional dan Daerah)

No	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional (Provinsi Kalsel & Sekitarnya)	Isu Strategis Daerah (Kabupaten HST)
1	Penguasaan Teknologi Digital dan AI	Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka	Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antar Wilayah Kalimantan (termasuk akses digital)	Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan (terutama di daerah terpencil).
2	Pendidikan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG's bidang pendidikan)	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Ketersediaan dan distribusi guru yang tidak merata di wilayah Kalimantan.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan modern.
3	Isu Perubahan Iklim & Lingkungan	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) (termasuk kebijakan PPPK)	Tantangan geografis dan infrastruktur (listrik, internet) yang menghambat akses pendidikan.	Rendahnya kompetensi guru dalam adaptasi teknologi dan metode pembelajaran inovatif.
4	Literasi Lintas Budaya dan Global Citizenship	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing Bangsa	Keterbatasan anggaran dan dukungan investasi untuk sektor pendidikan.	Belum optimalnya integrasi nilai-nilai lokal dan kearifan daerah dalam kurikulum.
5	Kesehatan Mental Peserta Didik dan Guru	Penguatan Pendidikan Karakter dan Pencegahan Radikalisme/Narkoba	Peningkatan risiko bencana (misalnya banjir) yang mengganggu proses belajar-mengajar.	Keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan dan inovasi pendidikan.

2.2.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, bahwa isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berpotensi memberikan akselerasi capaian pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi
3. Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan / Pelayanan Umum
6. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Budaya
7. Peningkatan Produktivitas Daerah

Diantara isu strategis pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 yang relevan dan selaras dengan urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang diampu dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, adalah terkait "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" dan "Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Budaya" .

Sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, kualitas sumber daya manusia harus diperhatikan semenjak perencanaan pembangunan hingga realisasi perencanaan yang telah dirumuskan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus memberikan perhatian khusus dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sehingga akselerasi pembangunan dapat terlaksana.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga secara otomatis akan memberikan dampak positif kepada pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga kehidupan setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi lebih baik. Selain itu, sumber daya manusia yang berdaya saing menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah siap dalam menghadapi segala permasalahan yang akan muncul selama pelaksanaan pembangunan dan mampu memanfaatkan peluang maupun potensi yang ada untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Saat ini, sumber daya manusia di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih butuh pembenahan terutama terkait kualitasnya. Sebagian besar penduduk yang bekerja hanya memiliki ijazah SD atau sederajat bahkan yang tidak pernah sekolah atau tidak tamat SD. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah utamanya bidang terkait perlu memfokuskan terhadap isu ketenagakerjaan ini agar kedepannya kualitas dan daya saing sumber daya manusia menjadi lebih optimal.

Aspek peningkatan SDM memerlukan prasyarat :

- Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan tata kelola kependudukan yang lebih baik.
- Adanya perlindungan sosial yang memadai khususnya bagi penduduk yang rentan goncangan.
- Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta sanitasi dan air minum.
- Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
- Peningkatan keterampilan dan kompetensi pencari kerja.

Peningkatan kesejahteraan sosial juga menjadi strategis untuk terus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan yang tinggi sehingga mengganggu proses pembangunan.Kemiskinan menjadi penting untuk terus ditanggulangi.Kualitas keluarga dan mayarakat serta pengarusutamaan gender juga harus terus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin berdaya dan meningkat partisipasinya dalam pembangunan.

Suasana masyarakat yang kondusif dan harmonis merupakan prasyarat mutlak untuk berjalannya pembangunan.Dengan demikian

menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dengan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan. Terjadinya gesekan-gesekan akibat perbedaan pandangan keagamaan maupun perbedaan sosial dan golongan akan menghambat pembangunan.

Keharmonisan kehidupan masyarakat yang tercipta akan mampu menjadikan masyarakat menjadi lebih dinamis sehingga dapat mengakselerasi pembangunan.Kehidupan masyarakat yang terjaga dengan suasana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga dan terkendali mampu meningkatkan dinamisasi kehidupan masyarakat.

2.2.5 Isu – isu Strategis Perangkat Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengacu pada Rencana Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, serta telaahan Rencana RTRW dan KLHS.

Dari hasil telaahan beberapa acuan tersebut untuk menentukan isu – isu strategis Dinas Pendidikan lima tahun mendatang maka perlu adanya berbagai pertimbangan, antara lain :

1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran
2) luasnya dampak yang ditimbulkan;
3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan, dan
4) kemudahan untuk dikelola.

Tabel 2.2.5.1
Isu Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Jumlah pendidik yang cukup secara kuantitas	sebaran (distribusi) pendidik yang belum merata, adanya satuan Pendidikan di daerah terpencil yang jumlah siswanya sedikit, tapi wajib ada karena untuk pemenuhan SPM kompetensi guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran inovatif (Kurikulum Merdeka) dan pemanfaatan TIK.	Isu SDM tidak memiliki relevansi langsung dengan KLHS	Perubahan paradigma pendidikan	Kebijakan guru PPPK yang belum bisa dimutasi	Mobilitas guru yang tinggi di daerah perbatasan	masih ada satuan pendidikan yang kekurangan guru
2	Sumber daya alam (pertanian, perikanan) yang dapat menjadi konteks pembelajaran berbasis kearifan lokal.	Keterbatasan sarana/prasarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi dan hands-on (praktik).	Peningkatan risiko bencana (banjir, kekeringan) yang mengganggu kegiatan belajar mengajar dan merusak fasilitas sekolah.	Tuntutan pendidikan abad 21 (STEAM, literasi digital).	Kebijakan pemerataan kualitas pendidikan dan SPM yang belum sepenuhnya tercapai	Kesenjangan infrastruktur pendidikan antar daerah.	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan Literasi Digital Pendidikan.
3	Keberagaman budaya lokal (misalnya seni tradisional, bahasa Banjar) sebagai muatan lokal yang memperkaya kurikulum.	Rendahnya minat generasi muda terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional.	Degradasi nilai-nilai kearifan lokal akibat modernisasi dan pengaruh budaya luar.	Dominasi budaya populer dan digital	Kurangnya pendanaan khusus untuk pelestarian budaya	Keterbatasan sinergi antar daerah dalam promosi budaya.	Penguatan Identitas Budaya Lokal Melalui Pendidikan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis.

Tujuan adalah Merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan adalah Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih:

"TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"

Misi Bupati dan Wakil Bupati yang diampu Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu:

1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Hubungan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tabel dalam tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, table 4.2 keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Tabel 3.1.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Visi :	**Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat**	
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.	1. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing
		2. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya
2. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.	2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak"	2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan "Ber Akhlak"

TabeL 3.1.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat yang adaptif, berdaya saing, religius dan berbudaya	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berbudaya		Indeks Pendidikan	Indeks	Hasil Perhitingan dari RLS dan HLS	57,39	57,72	58,06	58,39	58,72	59,06	59,39	
				Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Angka	Rapor Pendidikan	84,56	85,87	90,01	91,32	93,63	93,94	95,25	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	Hasil Perhitungam	56,40	56.75	57.00	57.25	57.50	57.75	60.00	
			Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Angka	BPS	8.35	8.44	8.53	8.62	8.71	8.80	8.86	
				Harapan Lama Sekolah	Angka	BPS	12.31	12.34	12.37	12.40	12.43	12.46	12.76	
				Capaian Raport Pendidikan	Angka	Kemendikdasmen	0	64.43	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Angka	Inspektorat HST	82.30	83.05	83.79	84.54	85.28	86.03	86.77	

NO	NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	Sasaran	Indikator	satuan	Definisi Operasional/Referensi Sumber Data	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9	10	11	12	13	14
				Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	Bappelitbangda	93,00	93,90	94,81	95,71	96,61	97,52	98,42	
				Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Angka	Hasil Survey	83,44	85,03	86,62	88,21	89,80	91,39	92,98	
			Meningkatnya Kemajuan Pembinaan Seni dan Budaya Daerah	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	Hasil Perhitungan	0	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00	
				Pewarisan Kebudayaan	Angka	Hasil Perhitungan	0	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	
				Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Angka	Hasil Perhitungan	0	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	

3.2 Strategi Kerja Jangka Menengah Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan, serta mengacu kepada RPJMD 2025-2029 dan evaluasi capaian pelayanan Dinas Pendidikan sampai tahun 2024 . Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi staf Dinas Pendidikan serta seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dengan cara – cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran – sasaran strategis yang menggambarkan tujuan – tujuan strategis.

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing**		
MISI I :	**Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pendidikan	1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas Pendidikan	1. Peningkatan rata-rata lama sekolah. 2. Peningkatan mutu pendidikan. 3. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas 4. Peningkatan akses dan fasilitasi pengembangan

VISI :	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing**		
MISI I :	**Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
			pendidikan lanjutan dan tinggi serta vokasi di daerah. 5. Peningkatan pemenuhan dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang adaptif dan modern. 6. Peningkatan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah dengan pengembangan kurikulum yang relevan, inovatif, berorientasi pada karakter dan kompetensi. 7. Pengembangan talenta dan minat siswa sesuai dengan kebutuhan dan potensi. 8. Peningkatan akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. 9. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan yang berkualitas. Mengembangkan jejaring kerjasama satuan pendidikan regional, nasional dan internasional

VISI :	**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing**		
MISI I :	**Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Berkembangnya Seni Dan Budaya Daerah	1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang adaptif, religius dan berbudaya	2. Peningkatan pengembangan kebudayaan daerah	1. Pengembangan budaya lokal dan non lokal yang positif.
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan yang Transparan, Akuntabel dan Profesional	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan "Ber Akhlak"	1. Meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan dan profesionalisme ASN 2. Penguatan karakter ASN dan pemerintahan religius 3. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	1. Meningkatnya Pemenuhan dan Penyajian Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Implementasi Kinerja

3.3 Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu bagi aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Merujuk pada strategi kerja yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka dapat disusun dan dirumuskan tentang arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2025-2029). Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3.1
Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD
Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	NSPK	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik	Meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan.	Mewujudkan SDM yang unggul, profesional, dan berdaya saing.	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru berbasis kebutuhan dan Kurikulum Merdeka.	Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru
				Mengoptimalkan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Komunitas Belajar sebagai wadah peningkatan profesionalisme PTK.	RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026
2	Kebijakan Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan efisien.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis teknologi.	Menyediakan akses TIK dan perangkat pembelajaran digital yang memadai di sekolah.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
				Meningkatkan literasi digital guru dan peserta didik melalui pelatihan dan integrasi TIK dalam kurikulum.	Peraturan Daerah Tentang Sistem Pendidikan Daerah atau Tata Kelola TIK
				Mengembangkan platform atau konten pembelajaran digital yang relevan dengan kebutuhan lokal.	RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, khususnya misi terkait teknologi

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap – tiap program dan kegiatann untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Pencapaian target kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) sesuanggungnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD, namun juga oleh sumber pendanaan lain (APBN, APBD Provinsi dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029 . Secara umum, fokus pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2025-2029 ditujukan untuk pendanaan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal dan pengembangan serta pemajuan kebudayaan. Secara rinci, program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang disertai dengan indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2025-2029 , sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan									
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, religius, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berbudaya								Indeks Pendidikan (Indeks)
									Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
									Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))
		Menigkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan							Harapan Lama Sekolah (tahun) (Tahun)
									Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
									Capaian Raport Pendidikan (Angka)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
			Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan						
				1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
									Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)
									Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)
									Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)
									Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)
									Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)
									Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
					Terpenuhinya SPM Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
							Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Unit)	1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)
							Tersedianya Mebel sekolah	1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Perlengkapan Sekolah	1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)
							Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)
							Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(Orang)	1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)
							Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)
							Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan(Konten Digital)	1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)
							Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan(Dokumen)	1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)
							Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik (Komunitas)	1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)
							Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (Ruang)	1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)
							Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)
							Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Terselenggarakannya Proses Belajar Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan	1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Ruang)	1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)
							Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Paket)	1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)
					Terpenuhinya SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
							Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Unit)	1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)
							Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Ruang)	1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)
							Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)
							Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)
							Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)
							Tersedianya Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(Orang)	1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)
							Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan(Konten Digital)	1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)
							Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik (Komunitas)	1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)
							Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.02.0055 - Pemberianlayanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)
							Terselenggarakannya Proses Belajar Bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan	1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (Ruang)	1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)
							Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Tersedianya Buku Teks dan Non Teks(Buku)	1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik (Paket)	1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Paket)	1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)
					Terpenuhinya SPM Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
							Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Unit)	1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)
							Tersedianya Mebel PAUD	1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Alat Rumah Tangga PAUD (Paket)	1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Perlengkapan PAUD (Paket)	1.01.02.2.03.0009 - PengadaanPerlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD(Orang)	1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)
							Tersedianya Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(Orang)	1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)
							Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan manajemen (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD (Satuan Pendidikan)	1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah (Unit)	1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)
							Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)
							Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan(Konten Digital)	1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)
							Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan(Dokumen)	1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU(Ruang)	1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)
							Terlaksananya Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik (Komunitas)	1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (Ruang)	1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)
							Tersedianya paket infrastruktur TIK (Paket)	1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)
							Terlaksananya Penataan Ruang/Sudut Baca (Ruang)	1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)
							Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah(Ruang)	1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	1.01.02.2.03.0034 - PembinaanMinat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)
							Tersedianya Buku Teks dan Non Teks(Buku)	1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)
							Terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (Ruang)	1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)
							Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Orang)	1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (Unit)	1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)
							Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)
							Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)
							Terseidanya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)

							TerlaksananyaPenyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME (Sasaran Program)**	**PROGRAM**	**Output (Sasaran Kegiatan)**	**Kegiatan**	**Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)**	**SUBKEGIATAN**	**Indikator**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)
					Terpenuhinya SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
							Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)
							Tersedianya Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan(Orang)	1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)
							Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)
							Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)

							TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	**TUJUAN**	**SASARAN**	**OUTCOME (Sasaran Program)**	**PROGRAM**	**Output (Sasaran Kegiatan)**	**Kegiatan**	**Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)**	**SUBKEGIATAN**	**Indikator**
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)
							Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)
							Terlaksananya Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)
							TerlaksananyaPelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)
							Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)
							TerlaksananyaFasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)
							Terlaksananya Kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.04.0031 - Pemberianlayanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)
							Tersedianya infrastruktur TIK	1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)
							Tersedianya Penataan Ruang/Sudut Baca	1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)
							Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)
							Tersedianya Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)
							Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)
							Terlaksananya BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0042 - BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)
							Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)
							Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)
							Tersedianya Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terselenggarakannya Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)
							Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium	1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)
							Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)
							Tersedianya Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)
			Terwujudnya Pembelajaran yang Merata dan Berkualitas di Satuan Pendidikan						
				1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					Persentase Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru (%)
					Tersusunnya Bahan Ajar Satuan pendidikan Dasar	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)
							Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)
							Terlaksananya penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)
							Terlaksananya Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)
							Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
					Tersusunnya Bahan Ajar Satuan pendidikan Anak Usia Dini	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
							Terlaksananya Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)
							Tersedianya Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)
							Terlaksananya penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)
							Terlaksananya Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)
			Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan						
				1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					Angka Numerasi (Angka)
									Angka Literasi (Angka)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
					Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
							Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)
							Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
			Tersusunnya buku cerita anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota						
				1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)
					Terselenggaranya Penyusunan Buku Cerita Anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
							Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah							
			Meningkatnya penyelenggaraan kesekretariatan penunjang urusan pemerintahan	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					Persentase kegiatan tepat waktu (%)
									Persentase Laporan Tepat Waktu (%)
									Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)
									Indeks Persepsi Internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat (Indeks)
									Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
					Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
							Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)
					Terselenggaranya Administrasi KeuanganPD Tepat Waktu	1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
							TersedianyaAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)
					Terselenggaranya Pengadministrasian BMD sesuai Standar	1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
							Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
							Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)
					Terselenggaranya layanan Pengadministrasian Pegawai PD	1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)
							Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
					Terselenggaranya Administrasi Umum PDBerjalan sesuai Standar	1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah			
							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)
							Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)
							Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
							Terlaksanaya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)
							Terlaksanaya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)
							Terlaksanaya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
					Terselenggaranya Pemenuhan BMD-PD	1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
							Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)
							Tersedianya Pengadaan Mebel	1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)
							Tersedianya PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	1.01.01.2.07.0006 - PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)
							Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)
					Terselenggaranya jasa penunjang urusan PD	1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
					Terselenggaranya Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)
							Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)
							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
		Meningkatnya Kemajuan Pembinaan Seni dan Budaya Daerah							
			Meningkatnya kelestarian seni dan budaya						
				2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)
						2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
							Terlaksanaya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksanaya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)
						2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)
			Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional (%)				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
						2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaya Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)
			Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					Persentase pelaku/komunitas sejarah tradisional yang berpartisipasi dalam program pembinaan sejarah (%)
						2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
							Terlaksanaya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)
							Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksanaya Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan						
				2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					Persentase Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)
						2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
							Terlaksanaya Penetapan Cagar Budaya	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)
							Terlaksanaya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)
							Terlaksanaya Pelindungan Cagar Budaya	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (Sasaran Program)	PROGRAM	Output (Sasaran Kegiatan)	Kegiatan	Sub Output (Sasaran Sub Kegiatan)	SUBKEGIATAN	Indikator
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*
							Terlaksanaya Pengembangan Cagar Budaya	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)
							Terlaksanaya Pemanfaatan Cagar Budaya	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)
			Persentase Museum yang dikelola						
				2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					Persentase museum yang memiliki koleksi terdaftar dan terdokumentasi (%)
						2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			
							Terlaksanaya Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)
							Tersedianya dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)
							Terlaksanaya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan)

TABEL 4.1.2

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				615.008.544.517		760.391.697.002		775.653.461.789		785.055.461.917		797.380.695.451		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				347.312.635.461		348.991.471.202		348.060.680.964		348.928.118.717		348.323.215.126		
Meningkatnya penyelenggaraan kesekretariatan penunjang urusan pemerintahan	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	95	347.312.635.461	95	348.991.471.202	95	348.060.680.964	95	348.928.118.717	95	348.323.215.126	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
	Persentase Laporan Tepat Waktu (%)	85	90		90		90		90		90			
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	95		95		95		95		95			
	Indeks Persepsi Internal antar bidang/unit terhadap layanan sekretariat (Indeks)	0	4		4		4		4		4			
	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah (Angka)	0	90		90		90		90		90			
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				209.279.985		209.279.985		209.279.985		209.279.985		209.279.985		
Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	209.279.985	4	209.279.985	4	209.279.985	4	209.279.985	4	209.279.985		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				164.279.985		164.279.985		164.279.985		164.279.985		164.279.985		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	10	164.279.985	10	164.279.985	10	164.279.985	10	164.279.985	10	164.279.985		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000	2	11.000.000		
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000	2	13.000.000		
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		11.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000	4	11.000.000		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				342.436.609.148		342.145.808.851		341.895.808.851		341.645.808.851		341.395.808.851		
Terselenggaranya Administrasi KeuanganPD Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.600	2.400	342.436.609.148	2.550	342.145.808.851	2.100	341.895.808.851	1.950	341.645.808.851	1.800	341.395.808.851		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				341.580.369.148		341.330.368.851		341.080.368.851		340.830.368.851		340.580.368.851		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.600	2.400	341.580.369.148	2.550	341.330.368.851	2.100	341.080.368.851	1.950	340.830.368.851	1.800	340.580.368.851		
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				849.240.000		808.440.000		808.440.000		808.440.000		808.440.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	849.240.000	12	808.440.000	12	808.440.000	12	808.440.000	12	808.440.000		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000	12	7.000.000		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				130.200.000		133.000.000		133.000.000		237.000.000		237.000.000		
Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	130.200.000	4	133.000.000	4	133.000.000	4	237.000.000	4	237.000.000		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				110.100.000		110.100.000		110.100.000		214.100.000		214.100.000		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	110.100.000	4	110.100.000	4	110.100.000	4	214.100.000	4	214.100.000		
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				20.100.000		22.900.000		22.900.000		22.900.000		22.900.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	20.100.000	4	22.900.000	4	22.900.000	4	22.900.000	4	22.900.000		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.249.998.591		2.602.959.450		2.702.959.450		2.902.959.450		3.102.959.450		
Persentase Pegawai PD yang dilayani	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.000	2.200	2.249.998.591	2.400	2.602.959.450	2.500	2.702.959.450	2.600	2.902.959.450	2.700	3.102.959.450		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	100		120		140		180		200			
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.899.999.021		1.902.959.450		1.902.959.450		1.902.959.450		1.902.959.450		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.000	2.200	1.899.999.021	2.400	1.902.959.450	2.500	1.902.959.450	2.600	1.902.959.450	2.700	1.902.959.450		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				349.999.570		700.000.000		800.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100	100	349.999.570	120	700.000.000	140	800.000.000	180	1.000.000.000	200	1.200.000.000		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				771.916.737		1.330.800.716		1.191.010.382		1.248.551.068		1.331.042.758		
Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	771.916.737	12	1.330.800.716	12	1.191.010.382	12	1.248.551.068	12	1.331.042.758		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.019.500		63.136.040		54.119.340		60.613.661		67.887.300		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	30.019.500	4	63.136.040	4	54.119.340	4	60.613.661	4	67.887.300		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.235.841		223.554.826		94.955.371		106.349.996		119.111.995		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	49.235.841	4	223.554.826	4	94.955.371	4	106.349.996	4	119.111.995		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56.960.000		70.241.600		82.066.611		91.914.604		102.944.357		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	56.960.000	4	70.241.600	4	82.066.611	4	91.914.604	4	102.944.357		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				79.831.396		159.940.000		119.885.360		134.271.603		168.430.298		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	79.831.396	4	159.940.000	4	119.885.360	4	134.271.603	4	168.430.298		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.500.000		3.844.500		3.844.500		3.844.500		3.844.500		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.500.000	12	3.844.500	12	3.844.500	12	3.844.500	12	3.844.500		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				77.800.000		102.423.750		128.479.200		143.896.704		161.164.308		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	77.800.000	12	102.423.750	12	128.479.200	12	143.896.704	12	161.164.308		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				399.870.000		566.100.000		566.100.000		566.100.000		566.100.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	399.870.000	12	566.100.000	12	566.100.000	12	566.100.000	12	566.100.000		
1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.200.000		55.160.000		55.160.000		55.160.000		55.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	25.200.000	12	55.160.000	12	55.160.000	12	55.160.000	12	55.160.000		
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				49.500.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000		86.400.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	4	49.500.000	4	86.400.000	4	86.400.000	4	86.400.000	4	86.400.000		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				543.005.000		1.450.000.000		750.000.000		1.450.000.000		750.000.000		
Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	11	543.005.000	15	1.450.000.000	15	750.000.000	15	1.450.000.000	15	750.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8	20		1		0		1		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				186.480.000		700.000.000		0		700.000.000		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	8	20	186.480.000	1	700.000.000	0	0	1	700.000.000	0	0		
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				255.025.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	255.025.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				51.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	13	11	51.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000		
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.500.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	50.500.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				442.628.000		412.813.400		412.813.400		412.813.400		412.813.400		
Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	442.628.000	12	412.813.400	12	412.813.400	12	412.813.400	12	412.813.400		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		5.200.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.200.000	12	5.200.000	12	5.200.000	12	5.200.000	12	5.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				259.800.000		259.800.000		259.800.000		259.800.000		259.800.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	259.800.000	12	259.800.000	12	259.800.000	12	259.800.000	12	259.800.000		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				177.628.000		147.813.400		147.813.400		147.813.400		147.813.400		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	177.628.000	12	147.813.400	12	147.813.400	12	147.813.400	12	147.813.400		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.998.000		706.808.800		765.808.896		821.705.963		884.310.682		
Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	8	528.998.000	9	706.808.800	9	765.808.896	10	821.705.963	10	884.310.682		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	17		17		17		17		17			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	40		40		40		40		40			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				188.908.000		190.908.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	8	188.908.000	9	190.908.000	9	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000		
1.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	50	50	25.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000		75.040.000		84.044.800		94.130.176		105.425.800		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	40	60.000.000	40	75.040.000	40	84.044.800	40	94.130.176	40	105.425.800		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				255.090.000		340.860.800		381.764.096		427.575.787		478.884.882		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	17	255.090.000	17	340.860.800	17	381.764.096	17	427.575.787	17	478.884.882		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				100.394.576.876		140.964.316.450		156.676.771.475		164.699.233.850		177.149.270.975		
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Angka)	0	46	100.394.576.876	47	140.964.316.450	48	156.676.771.475	49	164.699.233.850	50	177.149.270.975	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Angka)	0	95,45		95,5		95,55		95,6		95,65			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Angka)	0	88,76		89,26		89,76		90,26		90,76			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Angka)	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Angka)	0	91		91		92		93		94			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Angka)	0	84,69		84,94		85,19		85,44		85,69			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				26.592.047.694		46.059.201.200		46.689.607.600		47.254.607.600		47.479.607.600		
Terpenuhinya SPM Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100	26.592.047.694	100	46.059.201.200	100	46.689.607.600	100	47.254.607.600	100	47.479.607.600		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	253	253		253		253		253		253			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	253	253		253		253		253		253			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	28	16		28		28		28		28			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	28	16		28		28		28		28			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	510	506		506		506		506		506			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	18.000	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150	150		300		300		300		300			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	390	165		248		248		248		248			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.000	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	78	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	253	253		253		253		253		253			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5	10		10		10		10		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5.500	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4	4		20		20		20		20			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	6	10	500.000.000	10	1.000.000.000	10	1.500.000.000	10	2.000.000.000	10	2.000.000.000		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				99.999.905		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	78	100	99.999.905	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				50.713.525		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	150	150	50.713.525	300	125.000.000	300	125.000.000	300	125.000.000	300	125.000.000		
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				765.793.935		726.000.000		726.000.000		726.000.000		726.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	36	36	765.793.935	36	726.000.000	36	726.000.000	36	726.000.000	36	726.000.000		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1.999.824.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		3.750.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	390	165	1.999.824.000	248	3.750.000.000	248	3.750.000.000	248	3.750.000.000	248	3.750.000.000		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				499.874.424		2.288.519.500		2.288.519.500		2.288.519.500		2.288.519.500		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.000	1.250	499.874.424	1.250	2.288.519.500	1.250	2.288.519.500	1.250	2.288.519.500	1.250	2.288.519.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				49.950.000		104.657.000		104.657.000		104.657.000		104.657.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	253	253	49.950.000	253	104.657.000	253	104.657.000	253	104.657.000	253	104.657.000		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				37.100.000		224.710.000		224.710.000		224.710.000		224.710.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100	100	37.100.000	100	224.710.000	100	224.710.000	100	224.710.000	100	224.710.000		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				28.900.000		100.000.000		120.000.000		135.000.000		150.000.000		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	100	100	28.900.000	100	100.000.000	100	120.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				49.996.540		170.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	510	506	49.996.540	506	170.000.000	506	200.000.000	506	200.000.000	506	200.000.000		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				42.000.000		239.889.600		239.889.600		239.889.600		239.889.600		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	25	25	42.000.000	25	239.889.600	25	239.889.600	25	239.889.600	25	239.889.600		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				36.670.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	50	50	36.670.000	50	60.000.000	50	80.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				123.150.000		446.240.000		446.240.000		446.240.000		446.240.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	253	253	123.150.000	253	446.240.000	253	446.240.000	253	446.240.000	253	446.240.000		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				49.999.535		650.000.000		660.000.000		670.000.000		680.000.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	5	10	49.999.535	10	650.000.000	10	660.000.000	10	670.000.000	12	680.000.000		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				49.960.500		220.700.500		220.700.500		220.700.500		220.700.500		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	5.500	5.500	49.960.500	5.500	220.700.500	5.500	220.700.500	5.500	220.700.500	5.500	220.700.500		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				260.000.000		2.940.000.000		2.940.000.000		2.940.000.000		2.940.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	12	260.000.000	12	2.940.000.000	12	2.940.000.000	12	2.940.000.000	12	2.940.000.000		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				499.968.900		4.504.870.000		4.504.870.000		4.504.870.000		4.504.870.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	28	16	499.968.900	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				229.248.000		389.970.600		389.970.600		389.970.600		389.970.600		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100	229.248.000	100	389.970.600	100	389.970.600	100	389.970.600	100	389.970.600		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				18.900.000		50.000.000		70.000.000		90.000.000		120.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	253	253	18.900.000	253	50.000.000	253	70.000.000	253	90.000.000	253	120.000.000		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				99.999.600		4.504.870.000		4.504.870.000		4.504.870.000		4.504.870.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	28	16	99.999.600	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000	28	4.504.870.000		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				20.599.999.750		21.319.593.600		21.350.000.000		21.350.000.000		21.500.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	18.000	18.000	20.599.999.750	18.000	21.319.593.600	18.000	21.350.000.000	18.000	21.350.000.000	18.000	21.500.000.000		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				499.999.080		2.094.180.400		2.094.180.400		2.094.180.400		2.094.180.400		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	4	4	499.999.080	20	2.094.180.400	20	2.094.180.400	20	2.094.180.400	20	2.094.180.400		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				15.774.829.848		31.915.480.000		37.540.000.000		42.660.000.000		47.955.000.000		
Terpenuhinya SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100	15.774.829.848	100	31.915.480.000	100	37.540.000.000	150	42.660.000.000	150	47.955.000.000		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	9	6		10		14		20		24			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.000	735		1.000		1.500		2.000		2.500			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	50	15		17		18		20		22			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.248	170		200		250		300		350			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	150	18		30		50		75		100			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	350	1.700		1.000		1.500		1.750		2.000			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	200	200		250		300		350		400			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	4.300	4.244		4.300		4.350		4.400		4.450			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	2		4		6		8		10			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35	13		12		10		8		6			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	10	5		8		8		8		8			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	4		12		18		24		30			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	13		20		24		28		30			
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35		35		35		35		35			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				4.869.968.000		3.000.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		6.000.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1	4	4.869.968.000	12	3.000.000.000	18	4.000.000.000	24	5.000.000.000	30	6.000.000.000		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				90.000.000		3.000.000.000		2.750.000.000		2.500.000.000		2.250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	35	13	90.000.000	12	3.000.000.000	10	2.750.000.000	8	2.500.000.000	6	2.250.000.000		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				150.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	13	150.000.000	20	2.000.000.000	24	2.250.000.000	28	2.500.000.000	30	2.750.000.000		
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				498.800.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	10	5	498.800.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000	8	1.000.000.000		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				6.393.084.590		6.000.000.000		6.200.000.000		6.400.000.000		6.600.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	4.300	4.244	6.393.084.590	4.300	6.000.000.000	4.350	6.200.000.000	4.400	6.400.000.000	4.450	6.600.000.000		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				292.800.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	150	18	292.800.000	30	300.000.000	50	400.000.000	75	500.000.000	100	600.000.000		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.826.810.000		3.000.000.000		3.500.000.000		4.000.000.000		4.500.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.248	170	1.826.810.000	200	3.000.000.000	250	3.500.000.000	300	4.000.000.000	350	4.500.000.000		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				15.000.000		25.480.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	35	35	15.000.000	35	25.480.000	35	100.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				49.950.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50	50	49.950.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	120.000.000		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				24.985.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		135.000.000		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	35	35	24.985.000	35	80.000.000	35	100.000.000	35	120.000.000	35	135.000.000		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				24.985.000		50.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100	24.985.000	100	50.000.000	100	100.000.000	150	120.000.000	150	120.000.000		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				199.985.000		500.000.000		700.000.000		700.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	10	10	199.985.000	10	500.000.000	10	700.000.000	10	700.000.000	10	800.000.000		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				200.000.000		500.000.000		750.000.000		800.000.000		900.000.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	50	50	200.000.000	50	500.000.000	50	750.000.000	50	800.000.000	50	900.000.000		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				268.832.500		1.200.000.000		1.400.000.000		1.600.000.000		1.800.000.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	50	15	268.832.500	17	1.200.000.000	18	1.400.000.000	20	1.600.000.000	22	1.800.000.000		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				30.870.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		140.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	35	35	30.870.000	35	80.000.000	35	90.000.000	35	100.000.000	35	140.000.000		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				73.709.758		2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	2	73.709.758	4	2.000.000.000	6	2.250.000.000	8	2.500.000.000	10	2.750.000.000		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				150.000.000		80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	200	200	150.000.000	250	80.000.000	300	100.000.000	350	120.000.000	400	140.000.000		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				5.050.000		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1.000	735	5.050.000	1.000	1.000.000.000	1.500	1.500.000.000	2.000	2.000.000.000	2.500	2.500.000.000		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				360.000.000		2.000.000.000		2.250.000.000		2.500.000.000		2.750.000.000		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	350	1.700	360.000.000	1.000	2.000.000.000	1.500	2.250.000.000	1.750	2.500.000.000	2.000	2.750.000.000		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000		6.000.000.000		8.000.000.000		10.000.000.000		12.000.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	9	6	250.000.000	10	6.000.000.000	14	8.000.000.000	20	10.000.000.000	24	12.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				24.760.402.094		24.790.615.250		30.748.147.375		30.020.609.750		34.608.147.375		
Terpenuhinya SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.000	1.000	24.760.402.094	1.000	24.790.615.250	1.000	30.748.147.375	1.000	30.020.609.750	1.000	34.608.147.375		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	41	41		41		41		41		41			
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0	200		200		200		200		200			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	11	37		37		37		37		37			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	12		12		24		36		48			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	37	37		37		37		37		37			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	11		22		22		33		33			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	12		24		36		48		60			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		200		200		200		200		200			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	284		284		284		284		284			
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	284		284		284		284		284			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5	6		6		6		6		7			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		6		7		9		8		9			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6		6		6		6		7			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	85		100		115		130		150			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)		1.500		2.000		2.500		3.000		3.500			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	284		284		284		284		284			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7.250	7.300		7.350		7.400		7.450		7.450			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	6		6		6		6		7			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6		6		6		6		7			
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	75	100		125		150		175		200			
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	7.300		7.300		7.500		7.500		7.500			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	277	277		277		277		277		277			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50		50		50		50		50			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				391.588.150		1.961.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	5	6	391.588.150	6	1.961.740.000	6	2.161.740.000	6	2.161.740.000	7	2.161.740.000		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000		
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				69.374.375		69.374.375		69.374.375		69.374.375		69.374.375		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	50	50	69.374.375	50	69.374.375	50	69.374.375	50	69.374.375	50	69.374.375		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				4.746.500.000		4.650.000.000		5.000.000.000		5.250.000.000		5.500.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	7.250	7.300	4.746.500.000	7.350	4.650.000.000	7.400	5.000.000.000	7.450	5.250.000.000	7.450	5.500.000.000		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				6.348.259.764		6.500.000.000		7.000.000.000		7.500.000.000		8.000.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	1.000	1.000	6.348.259.764	1.000	6.500.000.000	1.000	7.000.000.000	1.000	7.500.000.000	1.000	8.000.000.000		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				448.587.405		650.000.000		700.000.000		750.000.000		800.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	75	100	448.587.405	125	650.000.000	150	700.000.000	175	750.000.000	200	800.000.000		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				30.846.000		60.846.000		80.846.000		180.846.000		180.846.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	277	277	30.846.000	277	60.846.000	277	80.846.000	277	180.846.000	277	180.846.000		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				4.745.000.000		1.192.467.875		4.875.000.000		2.252.462.375		4.875.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	7.300	4.745.000.000	7.300	1.192.467.875	7.500	4.875.000.000	7.500	2.252.462.375	7.500	4.875.000.000		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				150.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	284	150.000.000	284	250.000.000	284	250.000.000	284	250.000.000	284	250.000.000		
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah				50.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	0	2	50.000.000	2	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	284	0	284	0	284	0	284	0	284	0		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				150.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000		500.000.000		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	12	150.000.000	24	250.000.000	36	350.000.000	48	450.000.000	60	500.000.000		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				175.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	85	175.000.000	100	200.000.000	115	225.000.000	130	250.000.000	150	275.000.000		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				200.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	11	37	200.000.000	37	250.000.000	37	275.000.000	37	300.000.000	37	325.000.000		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				150.000.000		250.000.000		350.000.000		450.000.000		550.000.000		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	37	37	150.000.000	37	250.000.000	37	350.000.000	37	450.000.000	37	550.000.000		
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.961.740.000		1.961.740.000		1.961.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6	1.961.740.000	6	1.961.740.000	6	1.961.740.000	6	2.161.740.000	7	2.161.740.000		
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100.650.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	11	100.650.000	22	125.000.000	22	150.000.000	33	175.000.000	33	200.000.000		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				230.000.000		837.247.000		937.247.000		837.247.000		937.247.000		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		6	230.000.000	7	837.247.000	9	937.247.000	8	837.247.000	9	937.247.000		
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000		
1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				617.400.000		617.400.000		617.400.000		717.400.000		817.400.000		
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6	617.400.000	6	617.400.000	6	617.400.000	6	717.400.000	7	817.400.000		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				300.000.000		450.000.000		600.000.000		750.000.000		900.000.000		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)		1.500	300.000.000	2.000	450.000.000	2.500	600.000.000	3.000	750.000.000	3.500	900.000.000		
1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000		
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				417.400.000		417.400.000		517.400.000		517.400.000		617.400.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	6	417.400.000	6	417.400.000	6	517.400.000	6	517.400.000	7	617.400.000		
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				240.000.000		240.000.000		360.000.000		480.000.000		600.000.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	12	240.000.000	12	240.000.000	24	360.000.000	36	480.000.000	48	600.000.000		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	1.000	200.000.000	1.000	300.000.000	1.000	400.000.000	1.000	500.000.000	1.000	600.000.000		
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				417.400.000		417.400.000		517.400.000		517.400.000		617.400.000		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	417.400.000	1	417.400.000	2	517.400.000	2	517.400.000	2	617.400.000		
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				160.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	20	20	160.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				705.656.400		775.000.000		800.000.000		825.000.000		850.000.000		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	14	14	705.656.400	14	775.000.000	14	800.000.000	14	825.000.000	14	850.000.000		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				195.000.000		215.000.000		235.000.000		240.000.000		265.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	41	41	195.000.000	41	215.000.000	41	235.000.000	41	240.000.000	41	265.000.000		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	284	200.000.000	284	300.000.000	284	400.000.000	284	500.000.000	284	600.000.000		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				210.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		280.000.000		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	10	10	210.000.000	10	220.000.000	10	240.000.000	10	260.000.000	10	280.000.000		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				33.267.297.240		38.199.020.000		41.699.016.500		44.764.016.500		47.106.516.000		
Terpenuhinya SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	100	33.267.297.240	200	38.199.020.000	300	41.699.016.500	400	44.764.016.500	500	47.106.516.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	5		10		15		25		35			
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	40		40		50		50		60			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	13		14		15		16		17			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	13	13		13		13		13		13			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	6		6		6		6		7			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6		6		6		6		7			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20	20		20		30		40		50			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	130		130		135		145		150			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	3.500	3.385		3.500		3.600		3.700		3.800			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	20	25		50		75		100		125			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	20	30		40		50		60		70			
	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	2		2		3		3		3			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	3		4		5		6		7			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	13		13		14		14		15			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	2		3		4		5		6			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1		2		3		4		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	0		2		3		4		5			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	20		20		30		30		30			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				67.873.000		100.000.000		200.000.000		300.000.000		400.000.000		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100	100	67.873.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000		
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				21.554.830.000		23.500.000.000		24.000.000.000		24.500.000.000		25.000.000.000		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	3.500	3.385	21.554.830.000	3.500	23.500.000.000	3.600	24.000.000.000	3.700	24.500.000.000	3.800	25.000.000.000		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				125.000.000		250.000.000		375.000.000		500.000.000		625.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	20	25	125.000.000	50	250.000.000	75	375.000.000	100	500.000.000	125	625.000.000		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				103.036.500		153.040.000		203.036.500		303.036.500		253.036.000		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	13	13	103.036.500	13	153.040.000	13	203.036.500	13	303.036.500	13	253.036.000		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				3.669.523.000		5.000.000.000		5.500.000.000		6.500.000.000		7.500.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0	13	3.669.523.000	14	5.000.000.000	15	5.500.000.000	16	6.500.000.000	17	7.500.000.000		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	40	40.000.000	40	45.000.000	50	50.000.000	50	55.000.000	60	70.000.000		
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	2	50.000.000	2	80.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				0		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	20	30	0	40	200.000.000	50	250.000.000	60	300.000.000	70	350.000.000		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	3	50.000.000	4	75.000.000	5	100.000.000	6	125.000.000	7	150.000.000		
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				0		100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20	20	0	20	100.000.000	30	150.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				247.140.000		350.000.000		450.000.000		550.000.000		650.000.000		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	0	247.140.000	2	350.000.000	3	450.000.000	4	550.000.000	5	650.000.000		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				10.000.000		15.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	2	10.000.000	3	15.000.000	4	200.000.000	5	250.000.000	6	300.000.000		
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				25.000.000		30.000.000		40.000.000		45.000.000		55.000.000		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	13	25.000.000	13	30.000.000	14	40.000.000	14	45.000.000	15	55.000.000		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				55.980.000		150.000.000		180.000.000		235.000.000		27.500.000		
Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	55.980.000	2	150.000.000	3	180.000.000	4	235.000.000	5	27.500.000		
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				75.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	5	75.000.000	10	100.000.000	15	150.000.000	25	200.000.000	35	250.000.000		
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000		
1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca				50.000.000		50.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	2	50.000.000	2	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				28.993.740		50.000.000		100.000.000		200.000.000		200.000.000		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	3	28.993.740	3	50.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000		
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1.961.740.000		1.961.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	6	1.961.740.000	6	1.961.740.000	6	2.161.740.000	6	2.161.740.000	7	2.161.740.000		
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.961.740.000		1.961.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		2.161.740.000		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	6	1.961.740.000	6	1.961.740.000	6	2.161.740.000	6	2.161.740.000	7	2.161.740.000		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				500.000.000		500.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2	500.000.000	2	500.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000	3	800.000.000		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				113.941.000		650.000.000		675.000.000		725.000.000		750.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	130	113.941.000	130	650.000.000	135	675.000.000	145	725.000.000	150	750.000.000		
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				400.000.000		400.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2	400.000.000	2	400.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000		
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				177.500.000		177.500.000		177.500.000		177.500.000		177.500.000		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	177.500.000	1	177.500.000	1	177.500.000	1	177.500.000	1	177.500.000		
1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				300.000.000		600.000.000		900.000.000		1.200.000.000		1.500.000.000		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	100	300.000.000	200	600.000.000	300	900.000.000	400	1.200.000.000	500	1.500.000.000		
1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium				400.000.000		400.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2	400.000.000	2	400.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000		
1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	2	200.000.000	2	200.000.000	3	200.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				200.000.000		200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	20	200.000.000	20	200.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				166.463.850.000		269.355.950.000		269.706.050.000		270.098.150.000		270.448.250.000		
Terwujudnya Pembelajaran yang Merata dan Berkualitas di Satuan Pendidikan	Persentase Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru (%)	0	90	166.463.850.000	90	269.355.950.000	95	269.706.050.000	95	270.098.150.000	95	270.448.250.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				165.463.850.000		268.055.950.000		268.106.050.000		268.198.150.000		268.248.250.000		
Tersusunnya Bahan Ajar Satuan pendidikan	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	3	3	165.463.850.000	5	268.055.950.000	5	268.106.050.000	5	268.198.150.000	5	268.248.250.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	6	22		28		34		40		46			
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0	8.640		10.740		11.790		13.890		14.940			
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	0	170		190		210		230		250			
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				345.600.000		429.600.000		471.600.000		555.600.000		597.600.000		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0	8.640	345.600.000	10.740	429.600.000	11.790	471.600.000	13.890	555.600.000	14.940	597.600.000		
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				53.550.000		59.850.000		66.150.000		72.450.000		78.750.000		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	0	170	53.550.000	190	59.850.000	210	66.150.000	230	72.450.000	250	78.750.000		
1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				10.800.000		12.600.000		14.400.000		16.200.000		18.000.000		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	6	22	10.800.000	28	12.600.000	34	14.400.000	40	16.200.000	46	18.000.000		
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				53.900.000		53.900.000		53.900.000		53.900.000		53.900.000		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	1	1	53.900.000	1	53.900.000	1	53.900.000	1	53.900.000	1	53.900.000		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				165.000.000.000		267.500.000.000		267.500.000.000		267.500.000.000		267.500.000.000		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	3	3	165.000.000.000	5	267.500.000.000	5	267.500.000.000	5	267.500.000.000	5	267.500.000.000		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				1.000.000.000		1.300.000.000		1.600.000.000		1.900.000.000		2.200.000.000		
Tersusunnya Bahan Ajar Satuan pendidikan	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	0	297	1.000.000.000	297	1.300.000.000	297	1.600.000.000	297	1.900.000.000	297	2.200.000.000		
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	297		297		297		297		297			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	0	38		38		38		38		38			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	38		38		38		38		38			
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0	297		297		297		297		297			
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	297	200.000.000	297	300.000.000	297	400.000.000	297	500.000.000	297	600.000.000		
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0	297	250.000.000	297	250.000.000	297	250.000.000	297	250.000.000	297	250.000.000		
1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				200.000.000		300.000.000		400.000.000		500.000.000		600.000.000		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	0	297	200.000.000	297	300.000.000	297	400.000.000	297	500.000.000	297	600.000.000		
1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	0	38	150.000.000	38	200.000.000	38	250.000.000	38	300.000.000	38	350.000.000		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	0	38	200.000.000	38	250.000.000	38	300.000.000	38	350.000.000	38	400.000.000		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				137.482.180		259.959.350		259.959.350		259.959.350		259.959.350		
Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan	Angka Numerasi (Angka)	0	83,215	137.482.180	85,215	259.959.350	87,215	259.959.350	89,215	259.959.350	90,215	259.959.350	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Literasi (Angka)	0	81,215		82,215		83,215		84,215		85,215			
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				137.482.180		259.959.350		259.959.350		259.959.350		259.959.350		
Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	283	2	137.482.180	2	259.959.350	2	259.959.350	2	259.959.350	2	259.959.350		
	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				99.999.700		227.263.350		227.263.350		227.263.350		227.263.350		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	99.999.700	2	227.263.350	2	227.263.350	2	227.263.350	2	227.263.350		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				37.482.480		32.696.000		32.696.000		32.696.000		32.696.000		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	283	2	37.482.480	2	32.696.000	2	32.696.000	2	32.696.000	2	32.696.000		
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				700.000.000		820.000.000		950.000.000		1.070.000.000		1.200.000.000		
Tersusunnya buku cerita anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (%)	0	90	700.000.000	90	820.000.000	95	950.000.000	95	1.070.000.000	95	1.200.000.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				700.000.000		820.000.000		950.000.000		1.070.000.000		1.200.000.000		
Terselenggaranya Penyusunan Buku Cerita Anak berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	0	20	700.000.000	22	820.000.000	25	950.000.000	27	1.070.000.000	30	1.200.000.000		
	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	20		25		30		35		40			
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota				350.000.000		450.000.000		550.000.000		650.000.000		750.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	0	20	350.000.000	25	450.000.000	30	550.000.000	35	650.000.000	40	750.000.000		
1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah				350.000.000		370.000.000		400.000.000		420.000.000		450.000.000		
Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	0	20	350.000.000	22	370.000.000	25	400.000.000	27	420.000.000	30	450.000.000		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.688.240.230		5.445.230.460		10.071.710.920		19.074.671.840		36.780.593.680		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.470.630.230		2.741.260.460		5.882.520.920		11.765.041.840		23.530.083.680		
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Event)	20	24	1.470.630.230	26	2.741.260.460	28	5.882.520.920	30	11.765.041.840	35	23.530.083.680	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.370.630.230		2.641.260.460		5.482.520.920		10.965.041.840		21.930.083.680		
Meningkatnya Fasilitasi Pelaku Kebudayaan Daerah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5	5	1.370.630.230	5	2.641.260.460	5	5.482.520.920	5	10.965.041.840	5	21.930.083.680		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				1.070.630.230		2.141.260.460		4.282.520.920		8.565.041.840		17.130.083.680		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	5	5	1.070.630.230	5	2.141.260.460	5	4.282.520.920	5	8.565.041.840	5	17.130.083.680		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	0	30	50.000.000	30	100.000.000	30	200.000.000	30	400.000.000	30	800.000.000		
2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota				250.000.000		400.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		4.000.000.000		
Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	0	1	250.000.000	1	400.000.000	1	1.000.000.000	1	2.000.000.000	1	4.000.000.000		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		100.000.000		400.000.000		800.000.000		1.600.000.000		
Persentase Pelaku Kesenian Daerah yang difasilitasi	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000	20	800.000.000	20	1.600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				100.000.000		100.000.000		400.000.000		800.000.000		1.600.000.000		
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	400.000.000	20	800.000.000	20	1.600.000.000		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				325.000.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional (%)	80	90	325.000.000	95	1.068.750.000	96	1.068.750.000	98	1.068.750.000	100	1.068.750.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				325.000.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		
Meningkatnya Fasilitasi Pelaku Kesenian Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	325.000.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000		
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				325.000.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		1.068.750.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	325.000.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000	50	1.068.750.000		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		
Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	Persentase pelaku/komunitas sejarah tradisional yang berpartisipasi dalam program pembinaan sejarah (%)	80	90	150.000.000	95	150.000.000	96	150.000.000	98	300.000.000	100	300.000.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000		150.000.000		150.000.000		300.000.000		300.000.000		
Persentase Sejarah Lokal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000		
	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	1		1		1		1		1			
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				407.600.000		815.200.000		1.630.400.000		3.260.800.000		6.521.600.000		
Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	95	95	407.600.000	95	815.200.000	95	1.630.400.000	95	3.260.800.000	95	6.521.600.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				150.000.000		300.000.000		600.000.000		1.200.000.000		2.400.000.000		
Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	3	150.000.000	3	300.000.000	3	600.000.000	3	1.200.000.000	3	2.400.000.000		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	3		3		3		3		3			
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				50.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	0	3	50.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	3	400.000.000	3	800.000.000		
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		1.600.000.000		
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	3	100.000.000	3	200.000.000	3	400.000.000	3	800.000.000	3	1.600.000.000		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				257.600.000		515.200.000		1.030.400.000		2.060.800.000		4.121.600.000		
Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	4	257.600.000	4	515.200.000	4	1.030.400.000	4	2.060.800.000	4	4.121.600.000		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	5		5		5		5		5			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				157.600.000		315.200.000		630.400.000		1.260.800.000		2.521.600.000		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	20	20	157.600.000	20	315.200.000	20	630.400.000	20	1.260.800.000	20	2.521.600.000		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				50.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	0	4	50.000.000	4	100.000.000	4	200.000.000	4	400.000.000	4	800.000.000		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				50.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	5	50.000.000	5	100.000.000	5	200.000.000	5	400.000.000	5	800.000.000		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				335.010.000		670.020.000		1.340.040.000		2.680.080.000		5.360.160.000		
Persentase Museum yang dikelola	Persentase museum yang memiliki koleksi terdaftar dan terdokumentasi (%)	90	95	335.010.000	95	670.020.000	95	1.340.040.000	95	2.680.080.000	95	5.360.160.000	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				335.010.000		670.020.000		1.340.040.000		2.680.080.000		5.360.160.000		
Meningkatnya Pelindungan Warisan Budaya Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	335.010.000	1	670.020.000	1	1.340.040.000	1	2.680.080.000	1	5.360.160.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	0	90		90		90		90		90			
2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman				100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		1.600.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	0	90	100.000.000	90	200.000.000	90	400.000.000	90	800.000.000	90	1.600.000.000		
2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				50.000.000		100.000.000		200.000.000		400.000.000		800.000.000		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	800.000.000		
2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya				185.010.000		370.020.000		740.040.000		1.480.080.000		2.960.160.000		
Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya (Layanan)	0	5	185.010.000	5	370.020.000	5	740.040.000	5	1.480.080.000	5	2.960.160.000		

4.1.1 Program Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu strategis perangkat daerah sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan beberapa rencana kerja atau program prioritas perangkat daerah yang akan ditangani atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (lima) tahun kedepan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.1.1
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
Mendukung Program Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD	
			1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	
			1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
			1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium	
			1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
2.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Terwujudnya Pembelajaran yang Merata dan Berkualitas di Satuan Pendidikan	1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
			1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	
4.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
5.	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya kelestarian seni dan budaya	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	
			2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
6.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
7.	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	
			2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	
			2.22.06.2.01.0018 - Pengelolaan Operasional Taman Budaya	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Perangkat Daerah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, sedang indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja Perangkat Daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk member gambaran tentang prestasi Perangkat Daerah yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Perangkat Daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah, haruslah ditetapkan dengan baik dan tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja Perangkat Daerah Secara riil.Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Perangkat Daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah diperlukan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai indikator kinerja kunci (key performance indicator) yaitu indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur, untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah maka indikator kinerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai atau mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi, dalam hal ini adalah perangkat daerah. IKU menjadi bagian penting dalam dokumenRencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang disusun setiap 5 tahun sekali. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan kata lain, bahwa IKU adalah indikator yang

dapat mewakili keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah; Bersifat strategis yang artinya berkaitan langsung dengan mandat dan fungsi utama perangkat daerah; serta dapat dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode Renstra (periode 5 tahun).

Tabel 4.3.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan									
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	62,03	62,30	62,55	62,82	63,09	63,36	63,67	
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	56,40	56,75	57,00	57,25	57,50	57,75	60,00	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	82,3	83,05	83,79	84,54	85,28	86,03	86,77	
5.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,31	12,36	12,40	12,45	12,50	12,55	12,60	
6.	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	Indeks	55,40	55,75	56,00	56,25	56,50	56,75	59,00	
7.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,35	8,39	8,43	8,47	8,51	8,55	8,60	
8.	Pewarisan Kebudayaan	Angka	56,40	56,75	57,00	57,25	57,50	57,75	60,00	
9.	Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	83,44	85,03	86,62	88,21	89,8	91,39	92,98	
10.	Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	93,00	93,90	94,81	95,71	96,61	97,52	98,42	
11.	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya	Nilai	57,40	57,75	58,00	58,25	58,50	58,75	61,00	
12.	Capaian Raport Pendidikan	Angka	0	64,43	70	71	72	73	74	

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Secara umum, IKK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah seperangkat tolok ukur atau variabel terukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana Dinas Pendidikan telah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

IKK ini merupakan elemen krusial dalam dokumen perencanaan dan evaluasi, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Fungsi utama IKK adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Bagi Dinas Pendidikan, IKK memiliki beberapa tujuan spesifik:

1. Pengukuran Capaian: Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, atau peningkatan profesionalisme guru.
2. Dasar Pengambilan Keputusan: Data dari IKK digunakan oleh pimpinan dinas dan pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, misalnya dengan mengalokasikan anggaran ke program yang memiliki IKK rendah.
3. Akuntabilitas dan Transparansi: IKK membuat kinerja dinas lebih terukur dan transparan di hadapan publik dan pemangku kepentingan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Evaluasi Kinerja: IKK menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja berkala (tahunan atau semesteran) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program.

Tabel 4.4.1
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan										
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Persentase kegiatan tepat waktu	%	85	95	95	95	95	95	95	
2	Persentase Laporan Tepat Waktu	%	85	90	90	90	90	90	90	
3	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	%	85	95	95	95	95	95	95	
4	Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah	Angka	0	90	90	90	90	90	90	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Angka	84,56	85,87	90,01	91,32	93,63	93,94	95,25	
2	Persentase pelaku kesenian tradisional yang terlibat dalam program Pengembangan kesenia tradisional	%	80	85	90	95	96	98	100	
3	Persentase Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	95	95	95	95	95	95	95	
4	Persentase museum yang memiliki koleksi terdaftar dan terdokumentasi	%	90	95	95	95	95	95	95	
5	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	20	22	24	26	28	30	35	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	Angka	0	45	46	47	48	49	50	
8	Persentase Kualitas Pembelajaran dan Kompetensi Guru	%	0	0	90	90	95	95	95	
9	Angka Numerasi	Angka	0	81,215	83,215	85,215	87,215	89,215	90,215	
10	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	0	0	90	90	95	95	95	
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	Angka	0	95,4	95,45	95,5	95,55	95,6	95,65	
12	Angka Literasi	Angka	0	80,215	81,215	82,215	83,215	84,215	85,215	
13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B	Angka	0	88,26	88,76	89,26	89,76	90,26	90,76	
14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
15	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A	Angka	0	91	91	91	92	93	94	
16	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B	Angka	0	84,44	84,69	84,94	85,19	85,44	85,69	
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	59,42	61,21	63	65	67	69	71	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
19	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	19,36	21,43	23,5	25,57	27,64	29,71	
20	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	0	39,52	41,41	43,41	45,2	47,09	48,99	
21	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	0	1	4,08	7,15	10,23	13,3	16,38	
22	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	0	17,78	20,81	23,84	26,87	29,99	32,92	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah serta pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan dokumen Renstra ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyebarluaskan substansi dokumen Renstra PD kepada seluruh unit kerja internalnya dan pemangku kepentingan.
2. Renstra PD ini dijabarkan ke dalam Renja PD setiap tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD.
3. Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.
4. Perangkat Daerah akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Resntra secara responsif gender.
5. Renstra PD menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
6. Dalam hal terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) selama periode Renstra ini, maka penyesuaian terhadap dokumen Renstra PD dapat dilakukan sesuai ketentuan.
7. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan manajemen risiko strategis dan operasional berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMD dan Renstra PD.
8. Renstra PD ini menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan mendukung penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra PD secara berkala, serta melaporkannya kepada Bupati secara langsung dan atau melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.

5.2 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setelah berakhirnya Renstra PD Tahun 2025-2029. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah pada saat transisi maka:

1. Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian dari Renstra PD Tahun 2025- 2029.
2. Renstra PD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2030 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030 selama belum selesainya penyusunan Renstra PD Tahun 2030 - 2035.
3. Rencana kerja dan program tahun terakhir pelaksanaan Renstra PD harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan program strategis, meskipun terdapat perubahan kepemimpinan daerah.
4. Perangkat Daerah tetap dapat menyusun program dan kegiatan berdasarkan Renstra PD ini hingga adanya penyesuaian terhadap RPJMD yang baru.
5. Perangkat Daerah wajib menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas dalam masa transisi pemerintahan, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang dan tahunan daerah.
6. Dalam masa transisi, diperlukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan penyelarasan arah kebijakan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang masih berlaku.
7. Perangkat Daerah tetap diberi ruang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Renja PD dan usulan kegiatan sesuai dinamika kebutuhan serta masukan dari kepala daerah terpilih.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran di lingkungan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, baik pada masa normal maupun masa transisi pemerintahan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

H. Muhammad Anhar, S.STP, M.E.
Pembina Tk. I / IV/b
NIP. 19820916 200012 1 002